



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

BAGIAN ORAGANISASI - SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Jawa Timur, Indonesia



<https://www.blitarkab.go.id>



admin@blitarkab.go.id



Telpon (0342) 5559555

KATA PENGANTAR

LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah. LKjIP Tahun 2020 adalah tahap ke-5 (Akhir) siklus SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan, penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020, adalah tahun resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19. Kabupaten Blitar terdampak khususnya penurunan kinerja ekonomi daerah, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi menjadi -2,29%. Kondisi ini berdampak pada capaian kinerja indikator ekonomi daerah antara lain, pendapatan perkapita penduduk turun menjadi 30,93 juta per tahun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik menjadi 3,82% dan dampak simultannya angka kemiskinan naik menjadi 9,33%. Sektor basis ekonomi daerah yaitu pertanian, perdagangan, industri olahan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif. Pemerintah Kabupaten Blitar bergerak cepat melakukan berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan, antara lain *refocusing* anggaran, penerapan protokol kesehatan ketat, bantuan sosial dan insentif pajak daerah bagi pelaku usaha yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru (*new normal*) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019.

Capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 terhadap 12 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja adalah sebesar 103,25% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan serapan anggaran sebesar 93,70% dan terjadi efisiensi kinerja sebesar 8,62%. Capaian kinerja ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 104,38% atau hanya turun 1,13%. Jika dilihat dari capaian kinerja setiap indikator kinerja, maka dapat dihasilkan sebanyak 13 atau 59,09% (lebih dari setengah) dapat dicapai dengan **Sangat Berhasil** (di atas 100%), sebanyak 5 indikator atau 22,73% dicapai dengan **Berhasil**, 1 (4,55%) indikator dicapai dengan **Cukup Berhasil** dan sisanya 3 indikator atau 13,64% dicapai dengan **Kurang Berhasil**. Panurunan kinerja ini sebagai dampak resesi global akibat adanya pandemi Covid-19.

Langkah-langkah kebijakan kedepan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan capaian kinerja antara lain 1) strategi pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan ketat segera dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, dengan melakukan



refocusing anggaran yang benar-benar produktif dan memberikan dampak langsung pada pencapaian kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagai sasaran strategis; 2) menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan; 3) melakukan peningkatan sinkronisasi indikator dan target kinerja antara RPJMD dan Renstra OPD pendukung serta kualitas indikator kinerja dengan memperhatikan unsur-unsur SMART sehingga bisa menghasilkan pelaporan yang lebih akuntabel; dan 4) membangun sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar.

Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridlo kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar cepat memulihkan ekonomi dan memacu percepatan pencapaian visi Kabupaten Blitar.

Blitar, 24 Maret 2021
BUPATI BLITAR

Hj. RINI SYARIFAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Dasar Hukum.....	10
1.5 Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	15
2.3 Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	31
3.2 Capaian Kinerja Makro Ekonomi Daerah	99
3.3 Serapan Anggaran	102
BAB IV PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	
4.1 Kesimpulan.....	108
4.2 Tindak Lanjut	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik Luas Kecamatan.....	6
Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Blitar.....	6
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	7
Grafik Proporsi Penduduk Berdasarkan Usia	8
Grafik PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Grafik Angka Kemiskinan, TPT dan Indeks Daya Beli.....	35
Grafik Pendapatan Perkapita Penduduk.....	36
Grafik Jalan Kabupaten Blitar Kondisi Baik	43
Grafik Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik.....	43
Grafik Prosentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	44
Grafik Indeks Pendidikan.....	53
Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	54
Grafik Angka Harapan Hidup	57
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender	61
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender II.....	61
Grafik Nilai SAKIP.....	64
Grafik Nilai LPPD	66
Grafik Nilai IKM 2018-2019	70
Grafik Kepemilikan Administrasi Kependudukan.....	71
Grafik Pertumbuhan Ekonomi	79
Grafik Perkembangan PDRB ADHK	80
Grafik Pajak Daerah Sektor Usaha Pariwisata.....	80
Grafik Nilai IKM Layanan Perijinan	90
Grafik Nilai Realisasi Investasi.....	91
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	93
Grafik Unsur IKLH	93
Grafik Postur Kategori Desa di Blitar	97
Grafik Perbandingan Indikator Kinerja Makro Ekonomi Daerah.....	100
Grafik Angka Kemiskinan	100
Grafik Pertumbuhan Ekonomi	101
Grafik Pertumbuhan Ekonomi II.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020	17
Tabel Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.....	27
Tabel Kategori Capaian Indikator Kinerja.....	31
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020	31
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	35
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 1	38
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	42
Tabel Capaian Kinerja Setiap Sub Indikator	42
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 2	45
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	48
Tabel Perbandingan Data Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.....	49
Tabel Perangkat Daerah dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3.....	51
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	53
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 4.....	55
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	56
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 5	59
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	60
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 6	63
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	64
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 7	68
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	70
Tabel Hasil IKM Perangkat Daerah Tahun 2020.....	71
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 8	73
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	78
Tabel Jumlah Produksi Ternak.....	83
Tabel Jumlah Populasi Ternak dan Unggas	83
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 9	85
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	89
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 10	91
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	93
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 11	95
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	97
Tabel Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis 12	98
Tabel Perbandingan Capaian Beberapa IKU Terhadap Capaian Kinerja Regional dan Nasional Tahun 2020	100
Tabel Serapan Anggaran	103
Tabel Capaian Kinerja Tiap-Tiap Sasaran	109



BAB **1** PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good public governance (GPG) menjadi pilar penting dalam mencapai akuntabilitas kelembagaan pemerintahan. *Good public governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen

Bab 1 Berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Daerah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum
- E. Isu-isu Strategis

perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Blitar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki sebanyak 6 misi yang diuraikan ke dalam 12 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Penetapan sasaran strategis Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Blitar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. Pencapaian sasaran strategis tahun 2020 tersebut dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 yang memberikan prioritas kepada 136 program kegiatan yang salah satu diantaranya adalah Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. Pencapaian prioritas program diwujudkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Blitar Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai kebijakan strategis dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP antara lain: 1) melakukan *refocusing* program dan kegiatan dengan melakukan penataan dan efisiensi program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bliitar yang sudah ditetapkan; 2) meningkatkan sinkronisasi *crosscutting* dan *cascading* indikator kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah, eselon III, IV sampai ke

indikator kinerja individu bagi staf melalui proses bisnis; 3) menerapkan sistem manajemen data kinerja dalam rangka mengukur capaian kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dikendalikan; dan 4) mendorong setiap perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

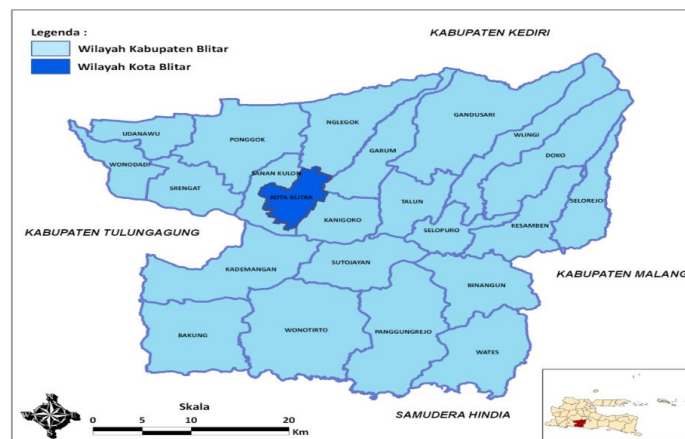
Pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya terus meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran strategis, melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan dilandasi semangat Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

1.2. Gambaran Umum

Leta

k Geografis

Kabupaten Blitar yang secara geografis terletak antara $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}58'$ – $8^{\circ}9'5''$ Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Posisi geografis strategis ini menjadikan salah satu kabupaten yang berkembang di bagian selatan Propinsi Jawa Timur.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar

Dengan ketinggian \pm 167 meter dan luas wilayah 1.588,79 km² yang terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan, kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagian utara memiliki kemiringan yang bervariasi, yaitu 2% - 15%, 15% - 40% dan diatas 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2. Bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Sisi timur bagian ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3. Bagian selatan merupakan wilayah yang sebagian besar berupa perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari daerah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20 persen dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tufa dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konglomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan,

sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah \pm 50 persen dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

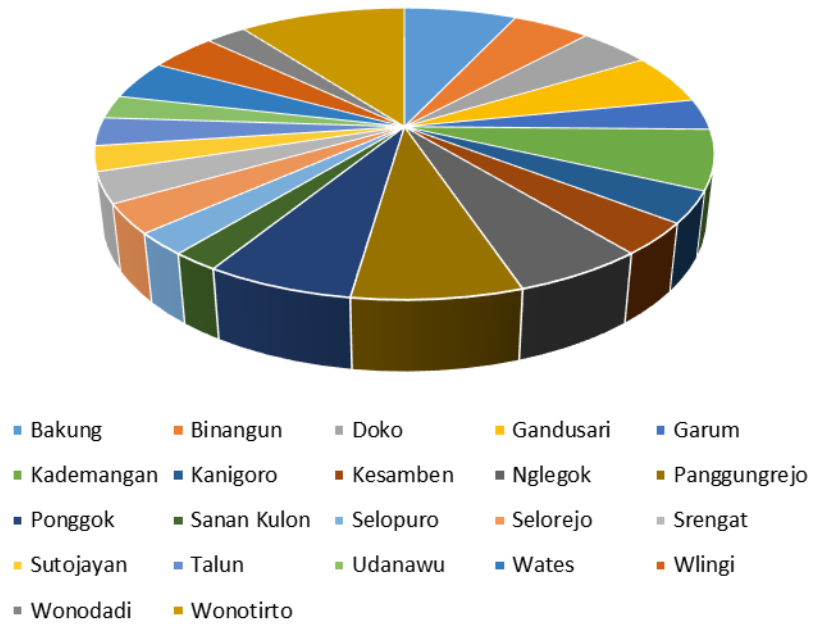
Iklm di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni sampai Oktober. Sedangkan musim penghujan antara bulan November sampai Mei dengan jumlah curah hujan 2.467 hingga 8.282 mm/bulan. Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok, sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter di atas permukaan air laut (dpl) hingga mencapai 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto.

Adapun morfologi dataran terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar yang dibentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0 sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

Wilayah Administratif dan Demografi

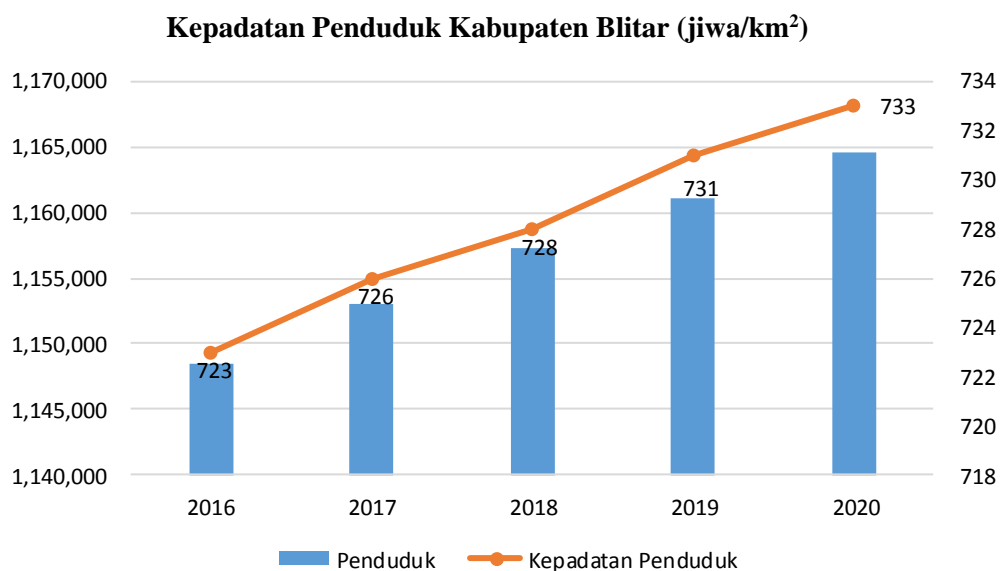
Secara administratif, Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 220 desa, yang terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT dengan pembagian luas wilayah dalam Km² sebagai berikut :

Luas Kecamatan



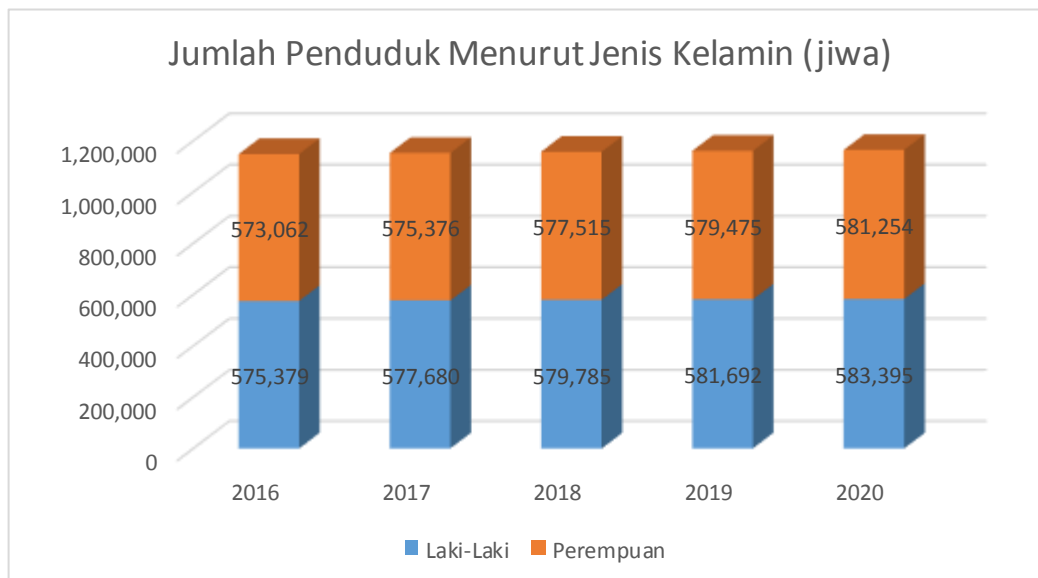
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2019 (diolah)

Sedang jumlah penduduk Kabupaten Blitar tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,30% yakni dari 1.161.167 jiwa tahun 2019 menjadi 1.164.649 jiwa pada tahun 2020 yang tersebar di 22 kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 220 desa. Tingkat kepadatan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pada tahun 2019 adalah sebanyak 731 jiwa/km² naik menjadi 733 jiwa/km², dengan detail perkembangan sebagai berikut:



Sumber: Indikator Sosial Kabupaten Blitar, 2020.

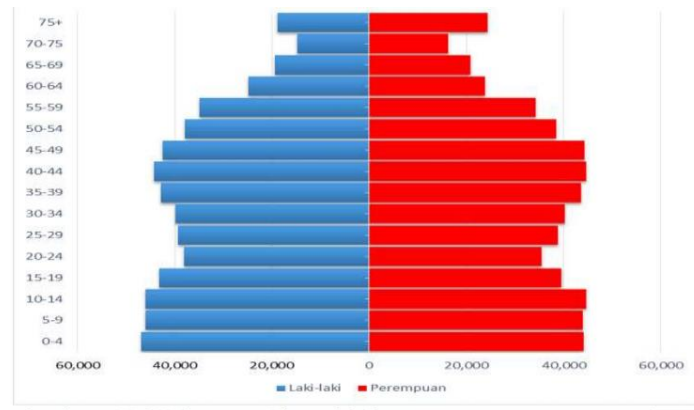
Adapun perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebagai berikut:



Sumber: Indikator Sosial Kabupaten Blitar, 2020.

Tren peningkatan penduduk terjadi baik pada penduduk baik laki-laki maupun perempuan, namun laju pertumbuhan mengalami tren perlambatan yang moderat. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar 2019 sebesar 0,33 persen, terus mengalami perlambatan menjadi 0,30 tahun 2020, dengan laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,32%) lebih besar daripada penduduk perempuan (0,28%). Terkendalnya laju pertambahan penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup.

Untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan usia, disajikan piramida penduduk pada gambar berikut. Piramida penduduk sangat penting untuk melihat rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya masuk kategori bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan usia angkatan kerja.



Sumber: Indikator Sosial Kabupaten Blitar, 2020

Dari gambar piramida di atas terlihat memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Jumlah penduduk usia muda lebih besar atau menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Berdasarkan Data Jumlah Penduduk SUPAS 2015, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 784.747 jiwa (67,38%) cukup dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-14 tahun sejumlah 237.100 jiwa (20,36%) maupun usia lebih dari 65 tahun sejumlah 142.802 jiwa (12,26%). Dengan proporsi jumlah penduduk usia produktif dan non produktif tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk dihasilkan angka 48,41, dimana setiap dua orang yang berusia kerja dan produktif menanggung satu orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial besar untuk dikembangkan

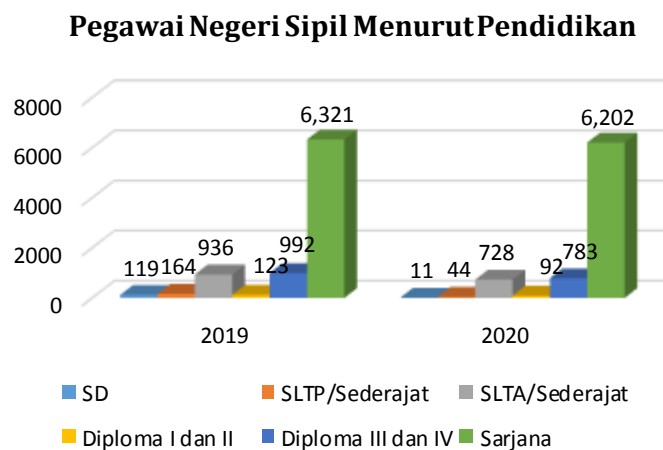
Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati. Selain itu, Bupati dibantu pula oleh Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan.

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk kualitas tenaga kerja

atau SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus diupayakan semakin ditingkatkan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020 sejumlah 7.860 personil, atau berkurang 9,18% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana jumlah PNS tahun 2019 sebanyak 8.655 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 4.593 orang (58,44%) dan PNS perempuan sebanyak 3.267 orang (41,56%), sebagaimana disajikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Blitar terdiri atas orang-orang dengan berbagai jenjang pendidikan yang dijelaskan pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Magister menempati urutan pertama dengan jumlah **6.202 pegawai** dari total 7.860 pegawai dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 121 pegawai. Kemudian diikuti oleh PNS dengan pendidikan Diploma D1, D2, D3, dan D4 berjumlah **875 pegawai** yang menurun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.115 pegawai atau menurun 240 orang dan proporsi paling sedikit berpendidikan SLTA ke bawah dengan jumlah **783 pegawai** yang menurun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.219 pegawai atau menurun sebanyak 436 orang. Sedangkan, jika dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 4.593 adalah perempuan dan untuk laki-laki sebanyak 3.267 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar selama satu tahun kerja, dengan tujuan:

- a. Sebagai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat;
- b. Memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020, yang merupakan periode tahun terakhir dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021;
- c. Memberikan informasi capaian sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2020 guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berikutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Isu-Isu Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan serta kesinambungan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik kecepatan/daya tanggap, ketepatan, serta akurasi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan (*Gerakan Ekonomi Kreatif*), penanganan kemiskinan, tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan, penanaman yang kuat pada pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan religiusitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan prima masyarakat.

Permasalahan Pemerintah Kabupaten Blitar serta kemungkinan permasalahan yang timbul di tahun-tahun selanjutnya dalam menghadapi peluang dan tantangan baik lokal maupun global perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang disusun mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Adapun isu strategis berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 yaitu :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan;
4. Peningkatan sumber daya manusia (SDM);
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pengembangan potensi pariwisata;
7. Kerjasama konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah;
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.

Tahun 2020 telah terjadi resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada perekonomian daerah yaitu Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi menjadi -2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5,10%. Pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan yaitu dari 31,38 juta per tahun menjadi 30,93 juta per tahun untuk ADHB dan untuk ADHK tahun 2010 turun dari 21,99 juta pertahun menjadi 21,42 juta pertahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar ini memberikan dampak terhadap beberapa indikator ekonomi sektoral antara lain angka pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB yang berkontraksi -7.25% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% dan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang berkontraksi -5,26 yang juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,13%. Sedangkan, angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB yang masih tumbuh lambat sebesar 0,06% yang juga di bawah target daerah yaitu 3%. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini tidak mampu memenuhi target kinerja daerah dalam laporan akuntabilitas kinerja daerah.

Dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif tersebut jelas berdampak pada indikator sosial lainnya antara lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. Angka TPT tahun 2020 yang ditarget sebesar 2,71% hanya mampu tercapai 3,82% atau tercapai 59,04%. Angka TPT ini juga mengalami kenaikan 0,77% dari tahun 2019 yaitu sebesar 3,05%. Dampak nyata dari resesi ekonomi adalah menurunnya pendapatan perkapita dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah keluarga miskin juga naik. Jumlah penduduk miskin naik jika dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 103,7 ribu jiwa menjadi 108,5 ribu jiwa di tahun 2020. Sedangkan, angka prosentase angka

kemiskinan penduduk juga mengalami kenaikan dimana sebanyak 8,94% di tahun 2019 menjadi 9,33% di tahun 2020 atau naik sekitar 0,39%. Kondisi sosial ini adalah akibat dari kinerja ekonomi daerah yang menurun akibat dari lesunya ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19.

Berbagai upaya kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dapat menahan makin terpuruknya kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari resesi ekonomi massif ini. Kebijakan pertama yang dilakukan adalah *refocusing* anggaran di seluruh perangkat daerah dengan prioritas program untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, dukungan kegiatan ekonomi dengan protokol kesehatan ketat, stabilitas sosial dan politik masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Kebijakan resmi penanggulangan dan penanganan dampak Pandemi COVID-19 adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 sebagai pedoman tatahan baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang seimbang dalam pengendalian dan penanganan Covid-19 dan menjadikan menegakkan protokol kesehatan ketat.

Beberapa perangkat daerah yang mengampu ekonomi secara agresif melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat antara lain Badan Pendapatan Daerah memberikan stimulasi insentif pajak berupa pembebasan pajak 100% bagi wajib pajak usaha pariwisata. Dinas koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan fasilitasi berupa kemudahan akses pemasaran produk lokal dan gerakan aksi bela beli produk Kabupaten Blitar untuk mendorong sektor usaha mikro dan kecil terus tumbuh. Dinas Pertanian melakukan penguatan kapasitas dan intensifikasi produksi pertanian, khususnya untuk tanaman biofarmaka, karena terbukti bisa bertahan dan untuk tanaman biofarmaka justru mengalami kenaikan meskipun rendah untuk tuntutan kesehatan. Kebijakan aksi tersebut menunjukkan telah mampu menahan kontraksi ekonomi Kabupaten Blitar yang masih dapat bertahan di minus (-) 2,29%.



BAB **2** PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2006 - 2026, Visi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 adalah : **“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”**. Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- **Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- **Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Bab 2 Berisi:

F. Perencanaan Strategis

G. Perjanjian Kinerja

H. Matriks RPJMD

- ***Berdaya Saing***, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

MISI

Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu :

1. ***Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;***
2. ***Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;***
3. ***Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);***
4. ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;***
5. ***Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;***
6. ***Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.***

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, yang sudah disesuaikan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020. Penyusunan LKjIP tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD ini memiliki 6 misi yang diuraikan ke dalam 12 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal sebagai prioritas

pembangunan daerah, yang pencapaian dilakukan melalui serangkaian strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahun 2020 telah terjadi resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19. Resesi ini berdampak terhadap perekonomian daerah yaitu Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi menjadi -2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5,1% tahun sebelumnya. Dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif tersebut jelas berdampak pada indikator sosial lainnya antara lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. Angka TPT tahun 2020 yang ditarget sebesar 2,71% hanya mampu tercapai 3,82% atau tercapai 50,04%. Angka TPT ini juga mengalami kenaikan 0,77% dari tahun 2019 yaitu sebesar 3,05%. Dampak nyata dari resesi ekonomi adalah menurunnya pendapatan perkapita dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah keluarga miskin juga naik. Jumlah penduduk miskin naik jika dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 103,7 ribu jiwa menjadi 108,5 ribu jiwa di tahun 2020. Sedangkan, angka prosentase angka kemiskinan penduduk juga mengalami kenaikan dimana sebanyak 8,94% di tahun 2019 menjadi 9,33% di tahun 2020 atau naik sekitar 0,39%.

Berbagai upaya kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dapat menahan makin terpuruknya kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari resesi ekonomi massif ini. Beberapa perangkat daerah yang mengampu ekonomi secara agresif melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat antara lain Badan Pendapatan Daerah memberikan stimulasi insentif pajak berupa pembebasan pajak 100% bagi wajib pajak usaha pariwisata. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan fasilitasi berupa kemudahan akses pemasaran produk lokal dan gerakan aksi bela beli produk Kabupaten

Blitar untuk mendorong sektor usaha mikro dan kecil terus tumbuh. Dinas Pertanian melakukan penguatan kapasitas dan intensifikasi produksi pertanian, khususnya untuk tanaman biofarmaka, karena terbukti bisa bertahan dan untuk tanaman biofarmaka justru mengalami kenaikan meskipun rendah untuk tuntutan kesehatan. Kebijakan aksi tersebut menunjukkan telah mampu menahan kontraksi ekonomi Kabupaten Blitar yang masih dapat bertahan di minus (-) 2,29%.

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan *good and clean governance*, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang kemudian dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja sebagai target kinerja Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-5 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menurunnya angka kemiskinan	1	Angka kemiskinan (%)	8,88
		2	Pendapatan per kapita (juta rupiah/Orang/Tahun)	37,31
		3	Indeks daya beli	0,70
		4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,71
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	1	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	91,51
3	Terwujudnya stabilitas wilayah	1	Persentase penanganan konflik (%)	100
		2	Persentase penegakan PERDA (%)	95
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Indeks Pendidikan	0,64
5	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan	0,8203
6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	78,10

	dan perlindungan anak			
7	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	BB
		2	Nilai LPPD	3,054
		3	Opini BPK	WTP
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik
9	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB (%)	7,03
		2	Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	7,13
		3	Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB (%)	3,00
		4	Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	4.607.159.360
10	Meningkatnya pelayanan perijinan	1	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik
11	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70
		2	Presentase Ketaatan Tata Ruang (%)	84
12	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1	Persentase desa berstatus pratama (%)	3,64

Program		Anggaran (Rp.)
I. Dinas Pendidikan		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.501.885.750
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.182.075.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	163.277.008
4.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	232.018.700
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	.645.358.850
6.	Program Pendidikan Sekolah Dasar	66.172.739.025
7.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.618.759.822
8.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	615.909.500
9.	Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.634.646.000
II. Dinas Kesehatan		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.713.853.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	657.795.000
3.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	288.162.500
4.	Program Pelayanan Kesehatan	92.757.286.279
5.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	59.600.110.038

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	30.117.995.250
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak	2.453.926.250
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD	85.812.524.194
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	1.600.000.000
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan	14.933.327.000
III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.179.210.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	469.521.500
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	93.400.000
5. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	137.478.282.532
6. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	18.975.190.760
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	24.778.716.000
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	28.383.616.530
9. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan	76.536.355.133
10. Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.107.285.000
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur	1.500.000.000
IV. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	729.987.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89.425.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	9.850.000
4. Program Pengembangan Perumahan	3.595.595.100
5. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	28.520.963.925
6. Program Pengembangan Kawasan Permukiman	14.297.401.203
7. Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	8.524.114.547
V. Satuan Polisi Pamong Praja	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.278.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	594.528.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.095.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	30.000.000
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas	961.425.000
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.121.745.000
7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	209.715.000
8. Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat	556.775.000
VI. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	931.096.300

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	48.136.400
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan	1.097.731.300
5. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik	1.814.996.000
6. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol	366.875.000
7. Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik	744.155.000
VII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	983.678.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	651.416.500
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	13.000.000
5. Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1.436.000.000
6. Program Kedaruratan dan Logistik	672.900.000
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.225.375.000
VIII. Dinas Sosial	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	749.321.200
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.233.200
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	14.475.000
4. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.144.586.000
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1.479.294.000
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	1.629.378.000
7. Program Pemberdayaan Sosial	636.903.600
IX. Dinas Tenaga Kerja	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	534.622.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	226.751.200
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	308.600.000
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	600.000.000
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.453.518.000
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	375.000.000
8. Program Transmigrasi Regional	181.400.000
X. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	557.561.220
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149.615.175
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	11.100.000

4. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	697.483.150
5. Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak	790.961.500
6. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.082.080.000
7. Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender	361.855.000
XI. Dinas Pertanian Dan Pangan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.421.760.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.380.262.500
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	188.282.500
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.302.900.000
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	7.223.911.000
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	1.052.750.000
8. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian	2.128.006.500
9. Program Pengembangan SDM Pertanian	4.863.270.000
10. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	1.604.325.000
11. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura	2.658.425.000
12. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan	1.995.935.000
XII. Dinas Lingkungan Hidup	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.520.018.100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.830.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	26.450.000
5. Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	484.125.000
6. Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	281.670.000
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	2.900.000.000
8. Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	2.310.129.000
9. Program Pengelolaan Kebersihan Pertamanan	9.657.075.000
XIII. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.232.230.850
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	902.900.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	268.135.000
4. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83.087.000
5. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	110.602.000
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.096.049.400
7. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	4.473.490.000
XIV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.504.432.882
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.374.982
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan	56.873.768

Capaian	
4. Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	6.558.392.306
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	828.081.000
6. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	5.432.360.957
7. Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa	975.197.274
XV. Dinas Perhubungan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.114.164.050
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	268.345.150
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.635.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	1.775.000
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	391.458.800
6. Program Peningkatan Pengendalian Ketetapan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1.899.385.000
7. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan	1.874.535.000
XVI. Dinas Komunikasi Dan Informatika	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	550.235.427
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.550.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	5.700.000
4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.809.708.360
5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika	4.828.227.900
6. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	600.000.000
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	523.983.000
8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	40.875.000
XVII. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	512.400.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.300.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	7.000.000
4. Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha	721.029.000
5. Program Produksi dan Rekonstruksi Usaha Mikro dan Koperasi	828.249.900
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	700.000.000
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	640.179.000
8. Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	867.660.000
XVIII. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	775.408.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.611.046
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	13.150.000
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	209.682.500

5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	262.703.400
6. Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	170.109.000
7. Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	571.893.554
XIX. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.412.363.750
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	455.391.200
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	17.000.000
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olah Raga	2.423.057.500
6. Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya	3.701.008.500
7. Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	2.399.182.00
8. Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.684.103.750
XX. Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	439.263.150
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.480.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	25.577.500
5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	996.251.700
6. Program Layanan dan Pelestarian Arsip	897.439.400
XXI. Dinas Peternakan Dan Perikanan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.410.508.200
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.314.765.000
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	196.400.000
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	554.279.750
5. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	2.096.204.500
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.145.160.950
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.367.604.100
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	845.810.000
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan	463.100.000
10. Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan	1.511.326.000
XXII. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	646.299.750
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	467.418.950
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	43.277.800
5. Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan	1.219.963.000
6. Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen	432.049.000

7. Program Pengembangan IKM	1.470.573.000
8. Program Pengelolaan Pasar Rakyat	3.547.345.000
9. Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD	45.330.000
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	500.000.000
11. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	100.000.000
XXIII. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	887.210.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	422.431.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	163.365.500
5. Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	523.758.000
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah	783.975.000
7. Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	1.480.957.500
8. Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah	552.137.100
9. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	507.125.000
10. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	613.510.000
11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	606.766.900
12. Program Penelitian dan Pengembangan	1.805.572.000
XXIV. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.414.144.340
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	927.616.400
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195.325.000
4. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	2.270.279.000
5. Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	724.605.000
6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah	519.069.000
7. Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah	1.043.973.000
XXV. Badan Pendapatan Daerah	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.967.088.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228.050.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	16.650.000
5. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan	4.610.520.000
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan	1.999.350.000
7. Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	1.052.350.000
8. Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	801.980.000

XXVI. Badan Kepedawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	444.313.243
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	437.039.507
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	12.860.000
4. Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai	888.688.500
5. Program Pangadaan dan Pembinaan Aparatur	2.975.607.500
6. Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/ Infomasi Kepegawaian	1.069.796.500
7. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2.572.208.000
XXVII. Sekretariat DPRD	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.215.657.375
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.149.125.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	885.555.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	180.800.000
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi	5.156.245.000
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan	9.498.384.125
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran	4.026.155.000
8. Program Penguatan Kelembagaan DPRD	11.938.078.500
XXVIII. Sekretariat Daerah	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.067.831.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.364.583.009
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	43.380.000
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Knerja Aparatur Pemerintah	1.689.970.000
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala	6.004.380.000
7. Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.803.070.000
8. Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	1.567.090.000
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	406.615.000
10. Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	134.200.000
11. Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum	610.766.250
12. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.571.575.715
13. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	511.633.500
14. Program Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	1.164.600.689
15. Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan	2.512.208.050

dan Protokol	
XXIX. Inspektorat	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	990.363.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	359.910.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.248.392.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	127.700.000
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	3.669.638.500
XXX. Kecamatan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.174.574.781
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.247.601.283
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	440.215.000
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	283.519.500
5. Program Fasilitasi Pemerintah Desa dan Kelurahan	25.278.095.685
6. Program Pelayanan Kecamatan	233.562.500
Jumlah Total Anggaran	1.112.518.783.289

2.3. Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Matriks
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. Indeks Gini	1. Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	9,97	9,88	9,62	9,37	9,12	8,88	8,65
			Pendapatan per kapita (juta rupiah/ Orang/ Tahun)	23,39	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
			Indeks daya beli	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,70
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	n/a	75,86	78,49	81,92	86,20	91,51	96,74	
Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Persentase penegakan PERDA	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	Persentase penanganan konflik	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penegakan PERDA	95	95	95	95	95	95	100

Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	0,64	0,66
		5. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8122	0,8137	0,8154	0,8170	0,8187	0,8203	0,8220
		6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	75,08	75,61	76,13	77,20	77,50	78,10	78,50
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	BB	BB	A
			Nilai LPPD	2,8841	3,0515	3,0525	3,0530	3,0535	3,0540	3,0542
			Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing										
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	9. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan pada PDRB	6,23	6,23	6,43	6,63	6,83	7,03	7,23
			Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	6,13	6,13	6,38	6,63	6,88	7,13	7,38

			Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	4,05	3,21	3,15	3,10	3,05	3,00	3,00
			Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	1.688.815.031	2.490.356.411	3.112.945.513	3.486.498.975	3.984.159.360	4.607.159.360	4.980.712.822
		10. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
			Persentase Ketaatan Tata Ruang	75	77	79	80	82	84	85
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan										
6. Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa berstatus pratam	12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa berstatus pratama	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0



BAB **3** AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Bab 3 Berisi:

- I. Pengukuran Kinerja
- J. Capaian Kinerja
- K. Realisasi Anggaran
- L. Kinerja Makro Ekonomi
- M. Analisis Efisiensi
- N. Capaian Prestasi

Sedangkan pemberian kategori pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	> 100%	Lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	8,88	9,33	94,93%	B
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah/orang/tahun)	37,31	30,93	82,90%	B
		3. Indeks Daya Beli	0,70	0,72	102,86%	SB
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	3,82	59,04%	CB
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	91,51	99,62	108,86%	SB
3.	Terwujudnya	6. Persentase	1007%	100%	100%	SB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	stabilitas wilayah	penanganan konflik (%)				
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%	100%	SB
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,64	0,59	92,19%	B
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8203	0,8234	100,38%	SB
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	78,10	79,05	101,33%	SB
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	11. Nilai SAKIP	BB	B	91,29%	B
		12. Nilai LPPD	3,0540	3,0624	100,28%	SB
		13. Opini BPK	WTP	WTP	100%	SB
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	100%	SB
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,03%	-7,25%	0%	KB
		16. Persentase	7,13%	-5,26%	0%	KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	pariwisata	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)				
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3%	0,06%	2,00%	KB
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	2.194.367	3.776.719	172,11%	SB
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%	SB
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	68,65	98,07%	B
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	84	100	119,05%	SB
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	3,64	0	200%	SB

Resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19 tahun 2020 telah berdampak pada perekonomian ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkontraksi - 2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas rata-rata 5,1% dari tahun sebelumnya. Pendapatan perkapita penduduk ADHB mengalami penurunan dari 31,38 juta pertahun menjadi 30,93 juta pertahun untuk ADHB dan untuk ADHK tahun 2010 turun dari 21,99 juta pertahun menjadi 21,42 juta pertahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar ini sebagai dampak dari penurunan beberapa sektor ekonomi antara lain pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB -7,25% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% dan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga -5,26 yang

juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,13%. Pada angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB masih tumbuh lambat sebesar 0,06% meskipun juga di bawah target daerah yaitu 3%. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini tidak mampu memenuhi target kinerja daerah yang harus dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah (LKjIP).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada indikator sosial lainnya antara lain tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. Angka TPT tahun 2020 yang ditarget sebesar 2,71% hanya mampu tercapai 3,82% atau tercapai 59,704. Angka TPT ini juga mengalami kenaikan 0,77% dari tahun 2019 yaitu sebesar 3,05%. Dampak nyata dari resesi ekonomi adalah menurunnya pendapatan perkapita dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah keluarga miskin juga naik. Jumlah penduduk miskin naik jika dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 103,7 ribu jiwa menjadi 108,5 ribu jiwa di tahun 2020. Sedangkan, angka prosentase angka kemiskinan penduduk juga mengalami kenaikan dimana sebanyak 8,94% di tahun 2019 menjadi 9,33% di tahun 2020 atau naik sekitar 0,39%. Indeks Pendidikan juga turun dan tidak mencapai target kinerja daerah, dimana yang ditargetkan 0,64 poin hanya mampu tercapai 0,59 poin atau kurang 0,05 poin atau tercapai 92,19%. Hal ini sebagai akibat dari berhentinya proses belajar mengajar di sekolah, sehingga berdampak pada harapan lama sekolah.

Berbagai upaya kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dapat menahan makin terpuruknya kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari resesi ekonomi massif ini. Beberapa perangkat daerah yang mengampu ekonomi secara agresif melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat antara lain Badan Pendapatan Daerah memberikan stimulasi insentif pajak berupa pembebasan pajak 100% bagi wajib pajak usaha pariwisata. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan fasilitasi berupa kemudahan akses pemasaran produk lokal dan gerakan aksi bela beli produk Kabupaten Blitar untuk mendorong sektor usaha mikro dan kecil terus tumbuh. Dinas Pertanian melakukan penguatan kapasitas dan intensifikasi produksi pertanian, khususnya untuk tanaman biofarmaka, karena terbukti bisa bertahan dan untuk tanaman biofarmaka justru mengalami kenaikan meskipun rendah untuk tuntutan kesehatan. Kebijakan aksi tersebut menunjukkan telah mampu menahan kontraksi ekonomi Kabupaten Blitar yang lebih parah dan masih dapat bertahan di minus (-) 2,29%, dimana angka ini masih di atas pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur yang menembus angka -2,29% dan juga di bawah

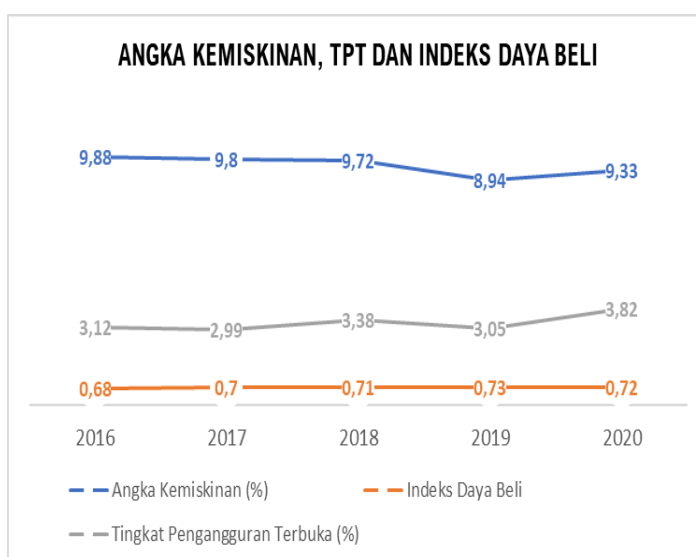
pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07%. Sedangkan, untuk indikator lain (non ekonomi), masih dapat mencapai target di atas 100%.

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan
Strategis 1

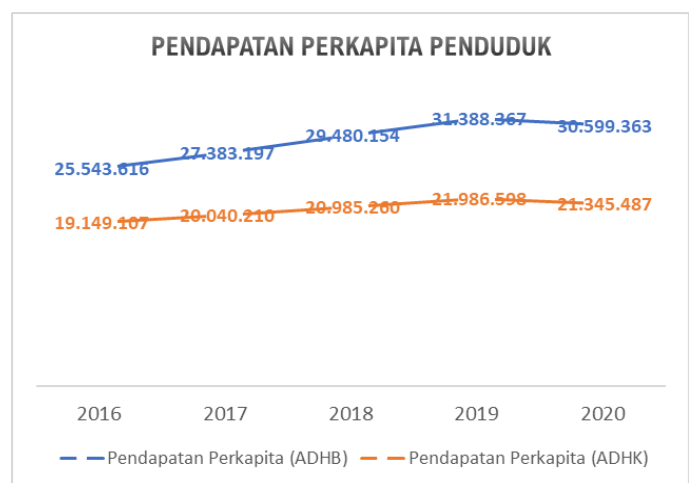
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Kemiskinan (%)	8,94	88,88	9,33	94,93%	0,39%	8,65
Pendapatan per kapita (juta rupiah/orang/tahun)	31,40	37,31	30,59	82,90%	-0,47	40,35
Indeks Daya Beli	0,73	0,70	0,72	102,86%	0,01	0,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	2,51	3,82	59,04%	0,71	2,70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				84,93%		

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis menurunnya Angka Kemiskinan tercapai sebesar 84,93% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Sebanyak 1 indikator target kinerja tercapai dengan Sangat Berhasil yaitu Indeks Daya Beli dengan capaian 102,86%, 3 indikator tercapai dengan Berhasil yaitu indikator angka kemiskinan tercapai 94,93% dan pendapatan perkapita 82,90% dan 1



indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercapai 59,04%. Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh berbagai perangkat daerah antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai disebabkan oleh dampak simultan adanya kontraksi ekonomi daerah sebagai akibat pandemi covid-19, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik 0,71%, dampak berikutnya adalah pendapatan perkapita penduduk tahun mengalami penurunan Rp.810.000,-/kapita/tahun, sehingga menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,39% dan jumlah penduduk miskin naik menjadi 108.550 orang pada tahun 2020 ini. Sedangkan, indeks daya beli masih tercapai 102,86% atau 0,72 karena ditopang oleh inflasi yang rendah yaitu 0,43 akibat konsumsi penduduk yang rendah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar menunjukkan perbaikan yang terus meningkat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sampai akhir tahun 2019 yaitu sebanyak 9,88% menurun menjadi 8,94% pada tahun 2019 atau mengalami penurunan rata-rata 3,22% selama 4 (empat) tahun terakhir. Akan tetapi tahun



2020, akibat Pandemi Covid-19 angka kemiskinan naik sebesar 0,39% menjadi 9,33% atau jumlah penduduk miskin naik menjadi 108.550 jiwa dari 103.750 jiwa tahun 2019. Berbagai program penanggulangan sudah dilakukan Dinas Sosial antara lain 1) bantuan pangan siap saji 17.300 paket; 2) Fasilitasi Program Keluarga Harapan sebanyak 45.396 KPM; 3) verval PBIJK 490.000 KPM; 4) fasilitasi pemberdayaan fakir miskin, tuna sosial, dan penyandang disabilitas; 5) penguatan kelembagaan sosial masyarakat seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi; dan 6) pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkala sebagai basis kebijakan. Peningkatan kualitas layanan terus dilakukan Dinas Sosial dengan mengembangkan dan menerapkan berbagai sistem antara lain aplikasi E-PBI untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK, mengembangkan Shelter/Rumah Singgah Sementara untuk PMKS/PPKS, dan KUD (Kelompok Usaha Disabilitas) melalui ragam kegiatan ekonomi kreatif. Angka kemiskinan Kabupaten Blitar 9,33% ini masih di bawah Nasional 9,70% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09%.

Capaian kinerja indikator pendapatan perkapita penduduk menunjukkan tren yang terus meningkat selama 4 tahun, dimana 2016 sebesar Rp.25,52 juta/orang/tahun terus naik menjadi Rp.31,4 juta tahun 2019 atau meningkat rata-rata sebesar 7,16%. Tahun 2020 akibat pertumbuhan ekonomi jatuh (minus), maka angka pendapatan perkapita penduduk ikut turun menjadi Rp.30,93 juta. Struktur ekonomi yang 30% nya ditopang sektor pertanian, menjadi salah satu faktor kondisi ekonomi tidak terpuruk parah. Faktor pertanian, sub sektor peternakan dengan kontribusi 40,1% memberikan stabilitas pertumbuhan ekonomi sektor pertanian meski lambat. Terhadap indikator Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Blitar, juga angka tren naik setiap tahun dimana tahun 2016 sebesar 0,68 menjadi 0,73 tahun 2019. Tahun 2020, sedikit menurun yaitu 0,72 poin. Indeks daya beli masyarakat tetap tinggi akibat dari inflasi ekonomi yang sangat rendah yaitu 0,43% akibat konsumsi masyarakat menurun.

Pada Indikator TPT, capaian kinerja Kabupaten Blitar selama 2016 – 2019 menunjukkan tren menurun, dari 3,38% tahun 2018 menjadi 3,05% di tahun 2019. Angka TPT kembali naik tahun 2020 menjadi 3,82% akibat dari Pandemi Covid-19. Pergeseran sektor agraris ke industri manufaktur memberikan peluang kerja dan kebutuhan kompetensi pencari kerja yang berbeda. Nilai tambah industri manufaktur yang lebih besar diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, angka TPT Kabupaten Blitar masih jauh di bawah angka TPT Nasional yaitu 7,07% dan angka TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 5,84% tahun 2020. Rendahnya, angka TPT ini disebabkan tetap tingginya realisasi investasi tahun 2020. Jumlah realisasi investasi tahun 2020 tercapai masih sangat tinggi, yaitu 1,27 triliun dengan jumlah usaha sebanyak 12.675 usaha dan tenaga kerja yang terserap 22.169 orang. Keberhasilan ini dampak dari reformasi pelayanan perijinan yang hanya 1 hari melalui inovasi berjudul “JOSS BANGET MAS” kepanjangan dari Jemput OSS (JOSS) Bersama Instansi Terkait (BANGET) dan Malam Hari Bisa (MAS)” dan agresifitas mengikuti acara forum investasi nasional dan internasional.

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 3,11 % ini menunjukkan angka yang semakin menurun jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 3,37 % atau turun 7,72%. Bahkan angka TPT ini jauh di bawah Angka TPT Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 3,92% dan Nasional sebesar 5,34%. Pergeseran peluang kerja dari sektor agraris ke industri menjadi penyebab adanya pengangguran dimana pemenuhan *skill* atau keterampilan pencari kerja di kerja sektor industri masih kurang. Sedangkan, capaian

kinerja indikator pendukung ketenagakerjaan lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terealisasi sebesar 70,61% tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 menjadi 72,93% dan akhir tahun 2020 kembali menurun 70,83%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi angkatan kerja tetap tinggi di masa pandemi Covid-19 ini. Salah satu faktor pendorong TPAK adalah banyaknya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan diikuti sebanyak lebih kurang 160 buah perusahaan dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 5.395 orang. Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan sudah tercapai dengan baik. Adapun indikator kinerja ekonomi yang tidak tercapai disebabkan oleh resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam mendukung pencapaian kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan ini antara lain: Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis adalah:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Sosial	3.046.295.857	2.801.264.367	91,96%
Dinas Tenaga Kerja	4.179.891.200	4.133.076.419	98,88%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Serapan Anggaran	8.459.881.338	8.127.681.272	95,86%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Data kependudukan, khususnya penduduk miskin, bersifat sangat dinamis, sehingga updating data secara berkala untuk penyediaan data kebijakan yang bersifat *real time* masih belum optimal. Selain itu, pemutakhiran data kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk penting dalam proses verifikasi data calon penerima bantuan masih sering terjadi.
2. Pelaksanaan program keluarga harapan, mestinya kalau sudah keluarga tersebut sudah mampu mandiri secara ekonomi, maka berhenti menjadi penerima manfaat. Akan tetapi *mindset* masyarakat menganggap bantuan yang diberikan pemerintah sebagai rejeki, sehingga pantang untuk ditolak meskipun sudah mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri. Sebagai akibatnya data PKH sulit sekali berkurang meskipun sudah dibantu dalam kurun waktu beberapa tahun.

3. Terbatasnya kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan ODK agar mampu memenuhi fungsi sosialnya (pangan, papan, pendidikan, kesehatan).
4. Masih adanya beberapa panti anak dan lansia yang belum memiliki surat legalitas serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pengurus panti menyebabkan pengelolaan panti anak dan lansia berjalan dengan kurang profesional.
5. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB);
6. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya;
7. Masih tingginya minat masyarakat Kabupaten Blitar untuk bekerja ke luar negeri, namun perlindungan terhadap CTKI/TKI belum maksimal.
8. Menurunnya kuota transmigran yang ditempatkan karena kuota ditetapkan oleh Provinsi tujuan transmigrasi.
9. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha. Tahun 2020 ini terjadi peningkatan yang signifikan dari target 1500 pelaku usaha ternyata pelaku usaha yang mengajukan izin usaha mencapai 5671 pelaku usaha. Peningkatan ini dikarenakan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah pusat terhadap pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemik covid-19 yang syarat utamanya adalah harus memiliki izin usaha. Hal ini menyebabkan izin usaha yang terbit juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari target 1500 izin terbit terealisasi 14.065 izin yang diterbitkan.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Melakukan inovasi berupa *software aplikasi system* untuk mempercepat pelaksanaan pemutakhiran data secara on-line, terhubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga memangkas proses panjang pengiriman data. Sistem tersebut antara lain aplikasi E-PBI yang bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK; membangun Rumah Singgah yang berfungsi sebagai *shelter* untuk PMKS/PPKS atau penampungan sementara bagi orang terlantar dan anak jalanan hasil operasi gabungan instansi terkait; dan pengoptimalan KUD (Kelompok Usaha Disabilitas) sebagai lembaga pelatihan bagi ODK (Orang Dengan Kecacatan) agar memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual.

2. Sosialisasi dan upaya penyadaran penerima bantuan PKH melalui pendekatan agama dan sosial lainnya. Kesadaran individu ditingkatkan agar tidak terus merasa miskin dan tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Aneka macam pelatihan dan bantuan modal juga dilakukan agar masyarakat fakir miskin memiliki semangat untuk bekerja sehingga lebih berdaya, mampu keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Sesuai ketentuan Kementrian Sosial, tahun 2020, setiap 6 tahun sekali harus ada perubahan KPM PKH – menjadi PKH Graduasi sehingga pada akhirnya PKM PKH yang kondisinya sudah lebih mampu otomatis akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
3. Melakukan intensifikasi berbagai pelatihan keterampilan kepada disabilitas dan ODK agar mampu menghasilkan karya yang bernilai ekonomis sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Hasilnya produk dikelola oleh wadah organisasi khusus yang secara spesifik mengelola ini. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terciptanya manfaat ekonomi dari aktivitas ODK. Kemudian, dibuatkan wadah khusus, organisasi tersendiri yang secara spesifik mengelola pelatihan ODK yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi keuangan. Untuk tahun anggaran 2020, yang melakukan tugas tersebut yaitu shelter PMKS Dinas Sosial yang ada di Kecamatan Garum.
4. Peningkatan pelatihan kepada pengurus panti agar memiliki keterampilan yang lebih profesional mengelola panti dan mampu terakreditasi. Bantuan permakanan dan uang saku juga diberikan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak dan lansia penghuni panti sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya lebih baik.
5. Sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang berhak mendapatkan bantuan, terhadap tenaga operator dari 248 desa/kelurahan dan memantau proses verifikasi dan validasi data oleh petugas di desa. Sosialisasi ke kepala desa/kelurahan ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemutakhiran basis data keluarga fakir miskin, serta peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi petugas-petugas lapangan yang mengalami kesulitan dalam proses input data di lapangan. Hasil laporan ini kemudian dilakukan dientri secara

integrasi ke dalam aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial, hingga data kemiskinan menjadi lebih valid.

6. Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam rangka percepatan pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat.
7. Sosialisasi tentang ketentuan UMK serta sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
8. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan.
9. Fasilitasi rekrutmen dan seleksi karyawan melalui aplikasi e-jobfair untuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Blitar dan beberapa perusahaan di Batam.
10. Pelaksanaan pameran bursa kerja (*job fair*) dengan mengundang perusahaan dari wilayah Blitar Raya maupun dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 pameran bursa kerja (*job fair*) dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan kepesertaan Perusahaan mencapai 135 perusahaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pencari kerja bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan pencari kerja/penganggur dapat terserap lebih maksimal.
11. Inovasi berupa Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA). Melalui peningkatan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA) ini diharapkan :
 - a) memudahkan para pencari kerja untuk mengakses informasi yang valid tentang jumlah lowongan kerja baik itu lokal blitar, luar daerah, dan luar negeri; dan
 - b) masyarakat/angkatan kerja mengetahui berbagai program kegiatan pelatihan baik itu pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.
12. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lokasi (sasaran) penempatan transmigrasi, serta kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
13. DPMPTSP terus melakukan inovasi pelayanan yang bertujuan memudahkan dan mempercepat layanan izin usaha. Tahun 2020 di-launching/mulai diterapkan aplikasi *software system* “Ini Baru Joss Banget Mas” (nama inovasi). Inovasi dalam pelayanan

perizinan dan non perizinan yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan izin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Inovasi lain adalah aplikasi *software* Digital Signature di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar melalui Aplikasi ImobilV2, mewujudkan kemudahan akses pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen izin usaha OSS dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemrosesan pelayanan perizinan dengan membuat inovasi “**Fast DS**” yaitu inovasi aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik berbasis website. Sudah terealisasinya penerapan Digital Signature dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Blitar, pelaku usaha tidak lagi ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis guna pemenuhan komitmen izin usahanya dan pelayanan pemrosesan perizinan akan lebih efektif dan efisien.

Sasaran : Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Strategis 2

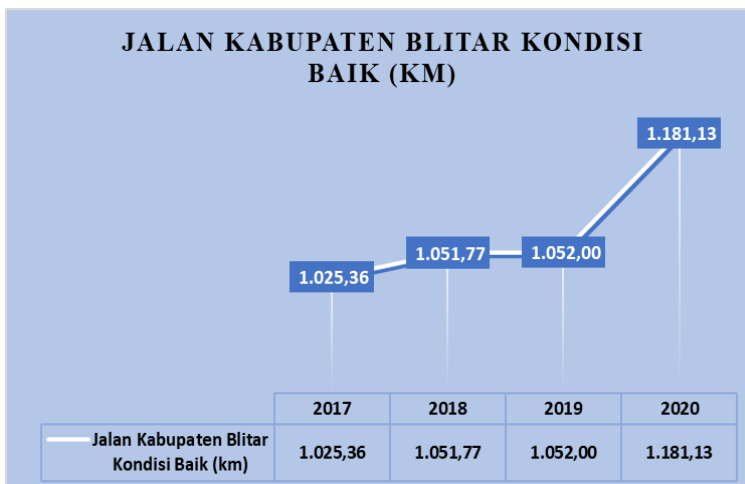
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	80,01	91,51	99,62	108,86%	19,61	96,74
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				108,86%		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur tercapai sebesar 108,86% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Indikator ini disusun dengan 5 sub indikator, yaitu 3 indikator berupa persentase jalan kondisi mantap, prosentase jembatan dalam kondisi mantap, dan jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan, 2 sub indikator yaitu persentase rumah tangga berakses air minum dan rumah tangga bersanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja masing-masing sub indikator tersaji sebagai berikut:

Indikator	OPD	Target	Realisasi	Capaian
Jalan Kondisi Baik (%)	PUPR	84,59%	68,95%	81,51%
Jembatan Kondisi Baik (%)	PUPR	86,02%	86,48%	100,53%
Saluran Irigasi Kondisi Baik (%)	PUPR	91%	100%	109,89%

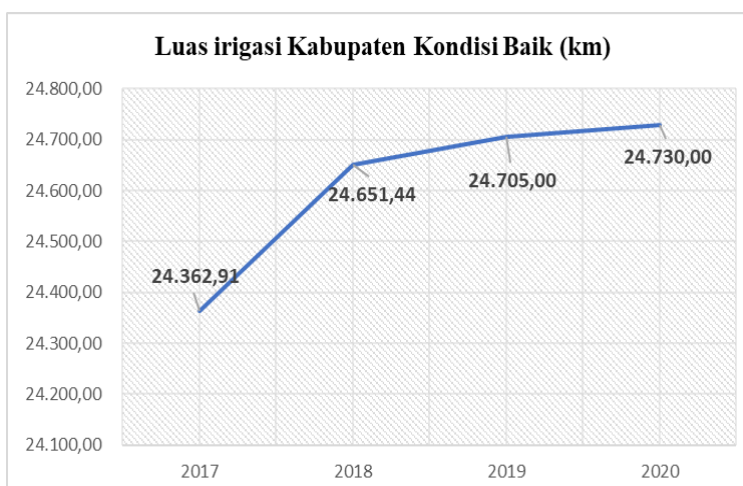
Fasilitasi Pendampingan Air Minum (keg)	Perkim	17	17	100,00%
Pengelolaan Drainase Lingkungan (m)	Perkim	9.000	9.555	106,17%
Realisasi Kinerja Layanan Infrastruktur				99,62%

Capaian kinerja setiap sub indikator menunjukkan tren kenaikan setiap tahun dan keberhasilan capaian target kinerja pada dinas pendukungnya. Perkembangan jalan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Sesuai SK



Bupati Blitar no 188/492/409.06/KPTS/2019 Tahun 2019, panjang jalan daerah kabupaten adalah 1.558,30 km. Jika tahun 2017 jalan kondisi mantap sepanjang 1.025,36 km maka terus terjadi peningkatan selama 4 tahun menjadi 1.181,13 km pada tahun 2020. Selama masa pandemi Covid-19, infrastruktur tetap menjadi prioritas program kerja daerah agar tetap dapat memberikan akses ekonomi produktif masyarakat dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Target kinerja sub indikator Jalan Kondisi Mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tercapai sebesar 81,51% atau Berhasil dari target kinerja 1.558,30 km hanya mampu terealisasi sepanjang 1.181,13 km.

Capaian kinerja cakupan (luas) Kabupaten Blitar dalam kondisi baik (Ha) sampai tahun 2020 juga menunjukkan tren peningkatan luasannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015, luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Blitar adalah



28.012 Ha. Tahun 2016 luas saluran irigasi kondisi baik adalah 24.091,18 Ha atau 86% dan terus meningkat sampai akhir tahun 2020 seluas 24.730 Ha atau 88,28%.

Jumlah penduduk yang memiliki akses Air Minum dan Air Bersih juga terus meningkat pada 4 tahun terakhir sebagai wujud komitmen atas hak-hak dasar layanan masyarakat. Jika tahun 2016 baru sebanyak 850.785 orang atau 74% dari jumlah penduduk, maka tahun 2019 telah menjadi 945.023 orang atau 81,42%, atau naik rata-rata 3,24% setiap tahun dan tahun 2020 sebanyak 955.012 penduduk sudah dapat mengakses air minum secara standar atau 82% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka pada akhir 2025, seluruh penduduk (100%) harus dapat mengakses air bersih. Sedangkan, untuk indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi, tahun 2016 sebanyak 242.438 rumah jumlah ini terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 246.417 rumah tangga dan pada akhir tahun 2020 telah menjadi 300.137 rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak. Pemenuhan infrastruktur dasar penduduk menjadi salah satu upaya meningkatkan keseimbangan menjaga produktivitas ekonomi daerah dan pola hidup sehat di masa pandemi covid-19 ini. Secara umum, capaian kinerja dalam pemenuhan cakupan layanan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, dapat dicapai dengan baik.

Kondisi jalan yang baik dan mantap juga didukung oleh sarana lalu lintas jalan raya berupa rambu-rambu lalu lintas. Prosentase pemenuhan rambu-rambu lalu lintas terus meningkat selama 5 tahun terakhir meskipun dengan prosentase kenaikan rendah karena banyaknya ruas jalan yang membutuhkan rambu-rambu. Jika pemenuhan rambu lalu lintas tahun



2016 sebesar 32,22% dari yang dibutuhkan, maka pada tahun 2020 terus meningkat naik menjadi 36,95% dari kebutuhan. Pada tahun 2020 ditargetkan kegiatan pemasangan dan rehabilitasi sebanyak 301 paket pemasangan dan rehabilitasi rambu lalu lintas dan semua dapat dilaksanakan 100%. Rambu lalu lintas dibutuhkan semua ruas jalan.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.345.556.639,50	94.789.433.920,00	94,46%
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.181.043.050,00	36.706.996.610,00	98,73%
Dinas Perhubungan	4.813.324.900,00	4.720.522.944,00	98,07%
Serapan Anggaran	142.339.924.590,00	136.216.953.474,00	97,09%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan.
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada.
3. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan.
4. Perlunya peningkatan *skill*/kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan.
5. Perlunya penyusunan Manual O & P (SOP) sebagai standar pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA).
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan.
7. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir) di wilayah Kabupaten Blitar.
8. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
9. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Belum optimalnya proses penyatuan data mengenai pembangunan infrastruktur Permukiman Rakyat.
11. Belum optimalnya proses penyatuan data mengenai *backlog* perumahan.
12. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan anggaran dan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13. Kurangnya data geospasial mengenai pertanahan.

14. Fasilitasi permasalahan tanah dalam hal ini fasilitasi ganti rugi lahan berdampak normalisasi Kali Bogel memerlukan koordinasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak.
15. Kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat, terutama dalam penggunaan fasilitas transportasi publik dan pendukungnya, sehingga mobilitas orang dan barang yang tinggi masih menjadi penyebab penyebaran Covid-19.
16. Masih kurangnya SDM perhubungan yang sesuai dengan kompetensinya, seperti belum adanya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin, manajemen terminal dan PPNS perhubungan. Misalnya, jumlah penguji dimiliki masih sangat kurang, dimana dari 15 alat uji dioperasikan oleh 4 orang penguji dari ASN dan 1 orang penguji dari tenaga non teknis.
17. Kesadaran masyarakat pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala maupun mengurus ijin trayek, masih rendah.
18. Belum adanya regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan angkutan, berpotensi terjadinya permasalahan. Contoh adalah munculnya angkutan umum berbasis online yang saat ini telah berkembang pesat di Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis adalah:

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai International Roughness Index (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan & dinding penahan jalan).
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
3. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan.
4. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, pembentukan Komir, re-organisasi HIPPA/P3A dan penyusunan Manual O&P.

6. Penerapan *reward and punishment* bagi aparaturnya maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Melakukan penyusunan database perumahan dan pembangunan infrastruktur permukiman rakyat.
8. Melakukan penyusunan kajian pengembangan perumahan dan kajian pengembangan kawasan permukiman.
9. Melakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait.
10. Melakukan penyusunan database pertanahan.
11. Sosialisasi untuk perilaku hidup bersih masyarakat dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada fasilitas perhubungan dan pintu masuk/keluar Kabupaten Blitar.
12. Melakukan intensifikasi pelaksanaan *screening* pada penumpang di titik-titik pusat perhubungan untuk memastikan penumpang dalam kondisi sehat.
13. Peningkatan kompetensi SDM bidang perhubungan dengan pengiriman pegawai dalam diklat peningkatan kapasitas SDM
14. Pelaksanaan sosialisasi pada pemilik angkutan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan ijin trayek, serta operasi simpatik di jalan raya yang dilaksanakan bersama dengan kepolisian dan CPM untuk ketertiban berlalu lintas.
15. Pengusulan anggaran untuk perlengkapan keselamatan jalan melalui APBD, APBD Provinsi Jatim dan APBN.
16. Menjalinkan kerjasama melalui program CSR untuk pemenuhan sarana dan prasarana transportasi.
17. Mengusulkan regulasi kebijakan operasional angkutan berbasis online dan review atas regulasi kebijakan pemerintah daerah yang telah ada dan menginventarisir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan di tingkat daerah.

Sasaran : Terwujudnya Stabilitas Wilayah Strategis 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase penanganan konflik (%)	100%	97%	100%	103%	-	100
Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%	95%	100%	-	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				100%		

Capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Stabilitas Wilayah mencapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja tersebut didukung oleh target kinerja Bakesbangpol dalam membina 9 ormas dan partai politik melalui penguatan legalitas yang berijin terdaftar. Parpol dan ormas yang dibina difokuskan pada parpol dan ormas yang sudah lolos seleksi dalam pengajuan bantuan hibah parpol dan ormas tahun sebelumnya untuk pembinaan administrasi keuangan, kelembagaan dan fungsionaris parpol dan ormas. Fasilitasi juga dilaksanakan partai politik dan organisasi sosial masyarakat, yang dilakukan sebanyak 10 kali dalam bentuk kegiatan: Workshop Keuangan Lembaga Politik; Sosialisasi pendidikan politik Pilkada; Pembinaan administrasi parpol; dan Deklarasi Pemilu Damai 2020.

Tahun 2020, tahun politik yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu dengan adanya Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). PILKADA tahun 2020 merupakan salah satu pemilu paling bersejarah karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Tingkat capaian partisipasi masyarakat sebesar 67.08 % dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Sedangkan 70% merupakan target nasional yang hingga pelaksanaan pemilu tidak dirubah, sehingga capaian kegiatan hanya 95,82%. Pada tahun 2020 ini dilakukan perubahan target kinerja di dalam perjanjian kinerja Bakesbangpol untuk partisipasi masyarakat dalam politik. Perubahan ini didorong dengan adanya target umum nasional yang ditetapkan oleh KPU dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 berjalan dengan lancar dan sukses, yang ditunjukkan dengan jumlah partisipasi masyarakat, jumlah suara sah lebih besar dan suara tidak sah menurun, serta menurunnya penduduk yang tidak memilih.

Perbandingan Data Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020

NO	URAIAN	2015	2020
1	Yang dipilih	Ya dan tidak	Paslon 1 Rijanto-Marheinis Paslon 2 Rini-santoso
2	Jumlah DPT	962.903	961.971
	Laki-laki	479.450	479.923
	Perempuan	483.453	482.048
3	Suara sah	502.382	621.252
4	Suara tidak sah	41.528	24.010
5	Yang tidak menggunakan hak pilih		
	Laki-laki	290.138	229.900
	Perempuan	254.865	254.039

Capaian kinerja prosentase penanganan konflik sosial didukung salah satunya oleh beberapa inovasi pelayanan dilakukan oleh Bakesbangpol. Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2020 Bakesbangpol Kabupaten Blitar melakukan inovasi berupa pengembangan Peta Mitigasi Konflik dan program M2I (Mempacasilakan Manusia Indonesia). Kedua inovasi tersebut telah diikuti ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopylipulara) Kabupaten Blitar Kategori Puri (Purwarupa Inovasi) dan *Innovative Government Award* (IGA) 2020. Kebijakan pengembangan ini mampu meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan dengan lancar.

Pelaksanaan pencapaian kinerja stabilitas wilayah juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui berbagai program prioritas yaitu mitigasi bencana, kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi. Kegiatan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana dilakukan pada 16 lokasi, pembentukan Destana sebanyak 10 Desa, pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan pada upaya sosialisasi akan pentingnya PHBS dan pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat serta penyediaan alat perlindungan diri untuk penanganan bencana Covid-19, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih dari 87 lokasi pasca bencana, dan program kedaruratan dan logistik diarahkan pada upaya penyediaan alat perlindungan diri, baik masker untuk masyarakat maupun hazmat untuk aparatur yang bertugas di garis depan penanganan bencana Covid-19 serta pelaksanaan kegiatan penyemprotan desinfektan dilingkungan perkantoran, fasilitas publik, tempat ibadah, sekolah, serta kawasan

perumahan hingga terbit keputusan dari Pemerintah yang menyatakan keadaan pandemi Covid-19 telah kembali normal atau dinyatakan selesai.

Capaian kinerja program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kedaruratan dan logistik dibantu dengan beberapa sistem aplikasi software yaitu Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK), Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan (Simak PRB), dan Jagoan Bencana (Jagongan Tanggap Bencana). SIKK menyajikan data yang memiliki informasi spasial dan referensi geografis dalam bentuk peta kejadian bencana, peta risiko, peta kerentanan peta kapasitas maupun peta bahaya. Keberadaan SIKK sangat mendukung/optimalisasi fungsi Pusat Pengendalian Operasional BPBD Kabupaten Blitar yang memiliki tugas untuk mengolah dan menyebarkan informasi bencana kepada masyarakat. Sistem aplikasi Simak PRB merupakan aplikasi penanggulangan bencana versi *Mobile App* yang berbasis Platform OS Android dan berfungsi untuk memberikan kemudahan akses berita, artikel, dan informasi seputar bencana yang ada pada website BPBD Kabupaten Blitar. Agenda Jagoan Bencana (Jagongan Tanggap Bencana) adalah agenda pertemuan rutin antar relawan per kecamatan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar untuk diskusi tentang karakteristik daerah masing masing yang dikaitkan dengan masalah kebencanaan dan upaya penanggulangan bencana yang bisa dilakukan. Sehingga, tumbuh kesadaran akan bencana dan bagaimana upaya penanganan bencana pada pra, saat kejadian dan pasca bencana.

Stabilitas wilayah juga diwujudkan melalui penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Beberapa kegiatan prioritas antara lain Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kegiatan Berbasis Massa di 22 kecamatan dengan capaian 100%, Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda di seluruh kecamatan, Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sebanyak 2.462 kali, Pelayanan dan Pencegahan Dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Peningkatan Kualitas Anggota melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Capaian kinerja Satpol PP antara lain penegakan peraturan daerah dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten tercapai 100%, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT) tercapai 1 orang satuan linmas untuk tiap RT, dan pemenuhan rasio siskamling di setiap desa/kelurahan ada 9 pos siskamling. Untuk capaian kinerja waktu tanggap daerah layanan wilayah pemadam kebakaran (WMK) masih 30 menit, maka Satpol PP harus memperpendek waktu respon menjadi 15 menit sesuai SPM. Secara umum capaian kinerja sasaran strategis terlaksana

dengan baik dengan *refocusing* anggaran pada prioritas kegiatan pendukung sasaran strategis yang ditetapkan. Perangkat daerah dan realisasi anggaran sasaran strategis terwujudnya stabilitas wilayah yaitu:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.692.141.490	4.438.046.0688	94,58%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.359.390.562,50	8.125.747.783,00	97,21%
Satuan Polisi Pamong Praja	3.242.055.000	2.780.083.600	85,75%
Serapan Anggaran	16.293.587.053	15.343.877.451	94,17%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Tingkat kesadaran pemilih yang diwujudkan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula, masih cukup rendah.
2. Masih tingginya heterogenitas dan semangat primordialisme masyarakat sehingga rentan terjadi benturan.
3. Mulai berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga mulai menjadi tambahan potensi gangguan stabilitas sosial.
4. Jumlah personil Satpol PP yang masih kurang untuk menangani kompleksitas dan banyaknya permasalahan penegakan Perda di lapangan dan luasnya wilayah operasi. Jumlah personil Satpol PP saat ini hanya 93 personil dimana jumlah ini jauh di bawah ideal yaitu sebanyak 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
5. Sarana dan prasarana, terutama mobil dinas, mobil pemadam kebakaran dan alat komunikasi anggota, seragam linmas yang bertugas di Linmas, masih sangat kurang. Sarana saat ini hanya mobil patroli 6 unit, kendaraan dinas mobil 3 (tiga) unit, motor 28 unit, dan mobil pemadam kebakaran hanya 2 unit.
6. Motivasi masyarakat menjadi kader Linmas yang masih rendah dan kaderisasi yang belum berjalan optimal.
7. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi acuan dan arah pembangunan Kabupaten Blitar yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, belum ada.
8. Mulai munculnya fenomena anomali iklim, perubahan hidrometeorologis, yang terjadi menyebabkan perubahan peta rawan bencana di Kabupaten Blitar. Wilayah pesisir pantai meningkat skala potensi ancaman bencana baik bencana kekeringan yang

berkepanjangan dan ancaman badai. Hal ini berakibat peta rencana penanganan bencana kekeringan berubah dan semakin luas.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Mengoptimalkan peran forum-forum (FKDM, KOMINDA, FKUB dan FPK) yang ada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan untuk mengantisipasi potensi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kondusifitas daerah.
2. Meningkatkan kegiatan FKUB dan FPK ke arah pemberdayaan organisasi yang dapat mengubah perbedaan menjadi keunggulan kompetitif.
3. Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. Mengefektifkan peran Tim Koordinasi dan Pokja P4GN di Kabupaten Blitar.
5. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilu di 6 dapil, memberikan dukungan kelancaran logistik pemilu, serta monitoring KAMTIBAS di daerah.
6. Pengajuan tambahan jumlah SDM Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP, Instansi vertikal terkait (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer) dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
8. Meningkatkan intensitas pembinaan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sebagai bagian dari upaya pencegahan, misalnya pembinaan terhadap pelaku usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna, Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah bagi pelaku usaha di tempat (penambang pasir wilayah Kabupaten Blitar) dan usaha yang terindikasi mencemari lingkungan.
9. Pengajuan penambahan sarana prasarana (mobil damkar, mobil patroli);
10. Intensifikasi penyuluhan atau sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan perda, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras;
11. Penambahan anggaran Bantuan Tidak Terduga untuk penyaluran bantuan air bersih kepada penduduk terdampak kekeringan.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Strategis 4

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pendidikan	0,5888	0,64	0,59	92,19%	0,02	0,66
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				92,19%		

Capaian rata-rata sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan sebesar 92,19% atau Kategori **Berhasil**. Realisasi capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Indeks Pendidikan tahun 2016 adalah 0,573853 dan naik signifikan di tahun 2017

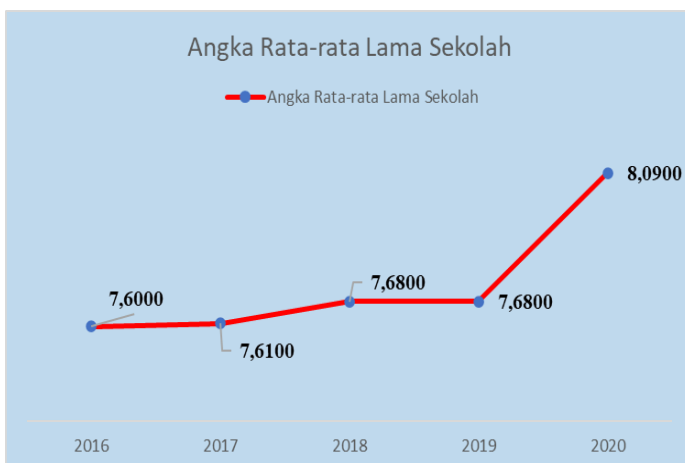


menjadi 0,5873 dan tahun berikutnya sampai 2020 trennya tetap naik meskipun moderat, yang mana pada tahun 2020 nilainya menjadi 0,5900. Berbagai program prioritas dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar, antara lain peningkatan kapasitas kepala sekolah SD dan SMP, peningkatan kompetensi dan kreativitas pembelajaran era Covid-19, fasilitas dan pendampingan sekolah adiwiyata, teknis penerapan pendidikan anti korupsi sekolah, penerapan kurikulum responsif gender, dan sampai dengan pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak melalui pelatihan parenting. Beberapa Inovasi pendidikan yang telah dilakukan antara lain Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM PINTAR).

Dinas Pendidikan terus meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk SD/MI mencapai 95% dan SMP/MTs sebesar 98%, perluasan akses pendidikan untuk meningkatkan rasio sekolah dan anak usia sekolah yang sudah mencapai 1:153 anak, peningkatan kompetensi guru dengan minimal kualifikasi S1 yang sudah mencapai 95%. Capaian kinerja pendidikan juga terus membaik yang dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Angka rata-rata sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian angka rata-rata lama

sekolah terus meningkat moderat selama 5 tahun terakhir, di mana tahun 2016 di angka 7,6 tahun dan di tahun 2020 menjadi 8,09 tahun atau naik rata-rata 0,016 per tahun. Sedangkan, untuk indikator angka melek huruf juga menunjukkan angka kenaikan yang moderat dimana tahun 2016 sebanyak 94,16% dan pada akhir tahun 2020 menjadi 94,70%. Salah satu faktor rendahnya kenaikan ini adalah kesadaran oleh masyarakat terhadap pendidikan formal masih cukup rendah dan masih kurang intensifnya program wajib (kejar paket) belajar.

Dukungan terhadap pencapaian indikator ini dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 4 program yaitu *pertama* peningkatan pelayanan perpustakaan seperti ada tambahan koleksi buku, peningkatan kompetensi petugas perpustakaan, peningkatan akses informasi secara elektronik (online), dan pelatihan kepada



masyarakat, sampai pengembangan perpustakaan desa dan keliling; *kedua*, peningkatan peran perpustakaan yang inklusif melalui pelatihan intensif bahasa Inggris, pengembangan budaya gemar baca, literasi ekonomi dan sosial, pengembangan seni rupa melukis, dll; *ketiga*, peningkatan *softskill* anak-anak melalui literasi internet, lomba dan kompetisi; dan *keempat*, yaitu penguatan sistem dan prosedur pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah. Akses ke perpustakaan melalui layanan perpustakaan keliling ke seluruh wilayah dengan 1 unit bus, 1 unit mobil dan 1 motor pintar, peningkatan literasi dan minat baca melalui berbagai lomba perpustakaan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan kepada 80 orang perwakilan dari masing-masing lembaga perpustakaan desa/kelurahan maupun lembaga lainnya.

Dalam bidang pelibatan pemuda dalam pengembangan pendidikan adalah melalui partisipasi dalam olah raga prestasi. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga, telah mendukung pencapaian prestasi olah raga siswa di dalam kompetisi regional maupun nasional tahun 2020. Selain itu, berbagai bimbingan teknis dan kompetisi pengembangan literasi budaya baca juga melibatkan para pemuda. Secara umum, pencapaian kinerja sasaran strategis

meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Kabupaten Blitar tercapai dengan baik dengan dukungan inovasi pelayanan yang terus meningkat.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategi:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pendidikan	765.941.599.542	753.818.001.585	98,42%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.251.063.883	3.198.099.237	95,25%
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.421.368.750	1.166.790.399	82,90%
Serapan Anggaran	770.614.032.175	758.182.891.221	92,19%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan pendidikan, khususnya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan khususnya guru tidak tetap, dan pemerataan penyebaran dan penataan tenaga guru masih belum optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
3. Belum maksimalnya pemenuhan pembiayaan operasional beberapa SD dan SMP, serta pemenuhan biaya tenaga guru dan biaya sarana prasarana.
4. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).
5. Perpustakaan belum memiliki tenaga fungsional pustakawan yang memiliki keahlian dan kompetensi mengelola perpustakaan, sehingga Perpustakaan umum daerah yang belum bisa diusulkan terakreditasi.
6. Infrastruktur penyelenggaraan pelayanan perpustakaan secara online dan alih media buku elektronik masih sangat terbatas, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai bahan bacaan dan pelayanan lebih lama dan lambat.
7. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa masih rendah.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam mencapai sasaran strategis, antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi dan pemberdayaan komite sekolah melalui fasilitasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar terus ditingkatkan.
2. Melaksanakan pemetaan guru per sekolah serta redistribusi guru sehingga kebutuhan guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memprioritaskan kebutuhan guru di daerah terpencil dengan memenuhi fasilitasi dan jaminan hidupnya.
3. Memanfaatkan BOS *Affirmasi* untuk menopang kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir dalam BOS reguler.
4. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
5. Mengusulkan formasi tenaga fungsional pustakawan dan perpustakaan daerah segera diusulkan akreditasi.
6. Peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dalam pengembangan layanan online dan akses sumber bacaan digital dilakukan secara bertahap.
7. Sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat desa dalam pengembangan perpustakaan desa (taman bacaan masyarakat) terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

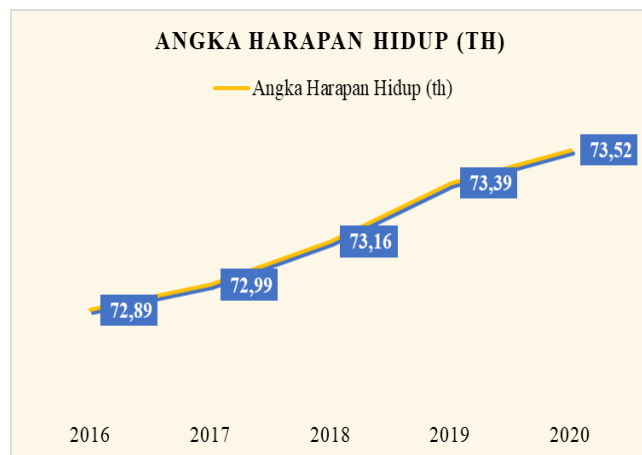
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kesehatan	0,8214	0,8203	0,8234	100,38%	0,02	0,8220
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				100,38%		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan mencapai 100,38% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sasaran strategis tersebut antara lain meningkatkan luasan akses sarana kesehatan melalui pembangunan RSUD Srengat, kualitas pelayanan Rumah Sakit Rujukan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, pemenuhan rasio tenaga kesehatan dan penduduk yang terus membaik, peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil, melahirkan, dan balita melalui puskesmas dan posyandu, program pencegahan penyakit melalui imunisasi, intensifikasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular, program penanganan atas

kesehatan jiwa. Program pengembangan pola hidup sehat (PHBS) untuk mencegah adanya penularan Covid-19 menjadi prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan penyakit menular di masa pandemi ini.

Berbagai capaian kinerja urusan kesehatan antara lain angka kematian bayi per 1000 kelahiran sebanyak 20 kejadian dan angka ini terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 18 kejadian dan tahun 2020 sebanyak 17 kejadian. Untuk terus menekan angka ini maka berbagai kegiatan bimbingan teknis dan strategi pencegahan kematian bayi dan ibu melahirkan dilakukan bagi seluruh bidan di



Kabupaten Blitar. Kinerja kesehatan secara umum Kabupaten Blitar dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakatnya. AHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir, di mana tahun 2016 sebesar 72,89 tahun dan akhir tahun 2020 sebesar 73,52 tahun atau rata-rata naik 0,022 tahun setiap tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Blitar sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Pelayanan kesehatan di tingkat strata 1 juga terus ditingkatkan, rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%. Capaian kinerja ini tidak lepas dari agresifitas Dinas Pendidikan melakukan berbagai inovasi pelayanan yang tidak kurang dari 19 jenis pelayanan dan diikuti dalam lomba pelayanan publik KOPI LYPULARA Tahun 2020.

Program pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera melalui peningkatan partisipasi aktif keluarga berencana juga sangat mendukung. *Refocusing* yang program dan kegiatan dilakukan tetap memberikan prioritas bagi pengembangan program unggulan salah satunya adalah memperbanyak Kampung KB yang akhir tahun 2020 sudah mencapai lebih dari 30 kampung. Sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga khususnya asektor KB terus dikembangkan, sehingga akan mampu mendukung kesejahteraan keluarga. Beberapa program prioritas lain yang dilakukan melalui proses pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja atas peserta KB menunjukkan bahwa keluarga kecil sudah melembaga di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berkeluarga kecil sudah menjadi tren dan kebutuhan serta masyarakat telah banyak yang menyadari pentingnya kualitas hidup dengan memiliki lebih sedikit anak mengingat kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Pada rasio akseptor KB tahun 2020 ini terdapat peserta KB baru sejumlah 33.450 orang dari total 252.736 pasangan usia subur atau dapat diartikan bahwa rasio akseptor KB pada tahun 2020 sebesar 13,2% Sedangkan untuk cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 78,306% dimana telah melebihi target yang ditentukan sebesar 77,2% yaitu terdapat 198.052 peserta KB aktif dari total 252.736 orang pasangan usia subur.

Kebijakan penting yang diambil masa Pandemi Covid-19 yang melanda nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat kita pada awal tahun 2020 memicu risiko terjadinya *Baby Boom* di masa pandemi dan akan sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Dalam hal ini, Dinas PPKBP3A menginisiasi terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188/84/409.06/KPTS/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*. Prestasi yang diraih antara lain menjadi Duta Genre Kabupaten Blitar berhasil memperoleh Juara III pada Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Ariel Ciptadi Darmawan pada Tahun 2020.

Dukungan Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sangat besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai fasilitas kesehatan strata 2 atau rujukan, RSUD terus berbenah meningkatkan kepuasan layanan publik kepada pasien. Evaluasi pelayanan terus dilakukan melalui penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata 2 kali dalam satu tahun. Di RSUD Ngudi Waluyo hasil IKM tahun 2019 semester I diperoleh 85,57 poin atau kategori Baik dan angka ini terus meningkat di semester II yaitu 86,775. Tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dimana nilai IKM sebesar 84,86 poin. Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan peningkatan kapasitas pemberi layanan juga dilakukan secara bertahap, untuk memberikan kemudahan dan kepuasan pelayanan.

Beberapa inovasi pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Ngudi Waluyo untuk meningkatkan pelayanan para pasien antara lain Kartu Pintar A BISMO (Antibiotik Stop Engorder Otomatis), Sistem Antrian Nomer Mandiri (Sianoman) dan layanan terjadwal DAR DER DOR. Kartu Pintar A BISMO merupakan aplikasi sistem untuk mengendalikan

masyarakat dalam menggunakan antibiotik secara benar. Masyarakat diminta untuk tidak abai dan terkendali secara teratur sesuai anjuran dokter dalam menggunakan antibiotik. Aplikasi Sianoman adalah layanan bagi pasien untuk mengambil nomor antrian secara online dan untuk memberikan pembatasan terhadap banyaknya layanan dalam satu hari di rumah sakit. Masyarakat sudah dapat memperoleh nomor dari rumah sehingga dapat untuk memutuskan jam berapa ke rumah sakit. Hal ini bertujuan agar antrian di RSUD tidak berjubel dan rentan terhadap penularan Covid-19. Sedangkan, aplikasi DAR DER DOR adalah aplikasi jadwal kunjungan pasien ke rumah sakit. Aplikasi ini memberikan alarm notifikasi kapan harus ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan secara berkala dan jenis pemeriksaan apa saja.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Kesehatan	258.686.542.584	231.615.168.773	89,54%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	7.556.315.430,00	6.339.184.964,00	83,89%
RSUD	178.946.060.576	205.263.338.923	87,18%
Serapan Anggaran	445.188.918.590	443.217.692.660	86,87%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan di beberapa desa, masih ada warga yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan adanya kontra indikasi bahwa anak akan menderita penyakit auto imun, dll.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular karena faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan pekerjaan;
3. Belum semua desa memiliki Posbindu PTM dan Posbindu KIT, dan belum adanya dukungan anggaran desa untuk pengadaan BHP penunjang skrining PTM;
4. Masih adanya keterbatasan SDM kesehatan dalam pelayanan.

5. Masih banyaknya stigma buruk terhadap ODGJ baik dari keluarga dan masyarakat;
6. Tingkat pendidikan, pemahaman serta status sosial ekonomi keluarga penderita masih kurang, dengan menganggap obat dari Puskesmas kurang berkhasiat dan membeli obat sendiri di apotek serta memilih pengobatan alternatif, namun tidak dilakukan secara rutin dan terus menerus. Sedangkan penderita ODGJ rentan untuk kambuh kembali ketika tidak mengkonsumsi obat secara rutin;
7. Belum adanya Pengawas Minum Obat bagi ODGJ di wilayah kerja puskesmas.
8. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di IGD dan ICU sehingga berdampak pada masih tingginya angka kematian kasar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
3. Penguatan rujukan berjenjang dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengaktifkan PSC.
4. Perbaikan mutu pelayanan *life saving* di IGD dan melaksanakan pelatihan ACLS bagi seluruh tenaga medis agar memahami penanganan kegawatdaruratan pada jantung.

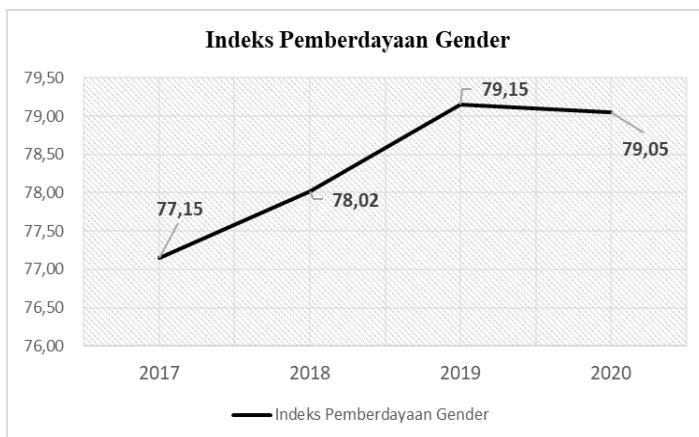
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Strategis 6

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pemberdayaan Gender	79,15	78,10	79,05	101,33%	(0,1)	78,50
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				101,33%		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak adalah sebesar 101,33% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan terus dilakukan, antara lain dalam sektor ekonomi, dari total 229.695 angkatan kerja perempuan di tahun 2020, diperoleh partisipasi perempuan sebanyak 201.306 orang. Sedangkan, partisipasi dalam bidang politik dan kelembagaan juga terus dilakukan. Indeks Pemberdayaan Gender terus

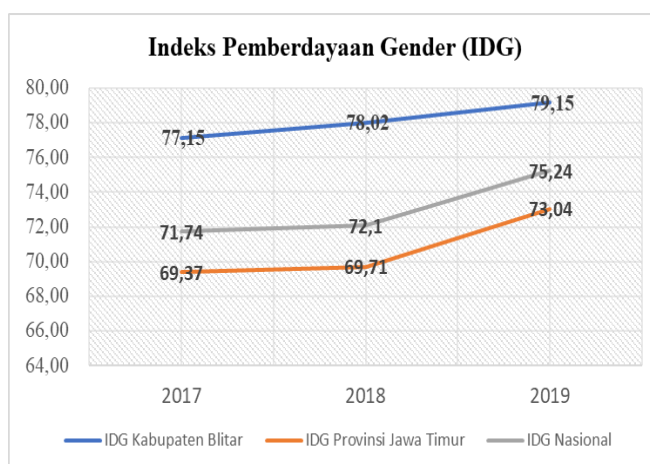
mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 77,15 poin tahun 2017 terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi sebesar 79,05 poin dan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan kecil. Kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan sehingga menyebabkan aktivitas kehidupan yang rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peran kehidupan



sosial masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah lagi, peran perempuan yang harus lebih fokus pada urusan domestik rumah tangga, yaitu menjaga kesehatan keluarga untuk mencegah dan menangani dampak penularan covid-19, maka peran sosial ekonomi dan politik perempuan lebih fokus pada kegiatan domestik. Namun demikian, selama 3 tahun terakhir, 2017 – 2019, angka indeks pemberdayaan gender Kabupaten Blitar terus di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta angka yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi kehidupan sosial masyarakat yang normal, komitmen dan pencapaian kinerja gender di Kabupaten Blitar terus meningkat.

Terkait dengan perlindungan anak, program prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar bekerjasama dengan seluruh OPD melalui berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi kepada seluruh Desa/Kelurahan dan sekolah di Kabupaten Blitar. Tahun 2019 terdapat 5



Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan Pembentukan Desa Kelurahan Layak Anak dan tahun 2020 terus ditingkatkan menjadi 248 desa. Kerjasama lintas sektor bidang pendidikan, seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan mulai PAUD hingga SMP, 29 SMA/SMK Negeri dan Swasta di bawah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur, serta 145 Madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah berkomitmen untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Hasilnya, Kabupaten Blitar kembali berhasil untuk mempertahankan predikat “**Kabupaten Layak Anak Dengan Kategori Madya**” pada tahun anggaran 2020.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di tahun 2020 berhasil mencapai 2,13% dari total keseluruhan perempuan yang bekerja yakni dari 253.033 orang perempuan yang bekerja terdapat 5.390 orang yang berpartisipasi di lembaga pemerintah penurunan angka tersebut ditengarai disebabkan oleh beberapa hal diantaranya bertambahnya penduduk yang masih berstatus pelajar dan adanya migrasi, serta adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Sedangkan untuk prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tercapai 18,31% yang berarti terdapat 46.344 orang yang bekerja di lembaga swasta dimana capaian ini masih belum memenuhi target yang ditentukan yaitu 35,77%.

Pada tahun 2020 Dinas PPKBP3A berusaha untuk meningkatkan dan memantapkan penerapan inovasi yang telah di *launching* di tahun-tahun sebelumnya. Rel Panjang Aman (Relawan Perlindungan Anak Dari Jangkauan Kekerasan Preman) dan Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahtera dengan Orientasi Surga) merupakan inovasi yang mampu menekan kasus kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus yang terjadi. Keberadaan P2TP2A juga dapat membantu menyelesaikan kasus, dalam hal ini korban akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Psikolog dan Ahli Hukum, serta adanya fasilitas Rumah Aman yang mampu memberikan pengamanan serta kenyamanan korban, agar korban merasa terlindungi dan mampu mengurangi rasa trauma. Seluruh pelayanan yang diberikan dalam hal perlindungan ini bersifat rahasia, sehingga korban akan merasa tenang dalam menjalani kehidupannya kedepan. Selanjutnya, sebagai upaya pasca kejadian kasus, jika dirasa korban memerlukan pelatihan dan pembinaan maka Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomunikasi dengan OPD teknis terkait dengan harapan korban memiliki ketrampilan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian keluarga. Prestasi lain yang Diraih Tahun 2020 Adalah Kategori Profil Terbaik DAFA Award Tingkat Nasional yang Diraih Oleh Forum Anak Kabupaten Blitar

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	1.066.967.120	971.322.870	91,03%
Serapan Anggaran	1.066.967.120	971.322.870	91,03%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Masih minimnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis dan memiliki *concern* pada Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Masih rendahnya kesadaran laki-laki tentang kesetaraan gender, sehingga mendorong tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih belum rendahnya pemahaman dan kesadaran Pemerintah dan Masyarakat Desa akan arti pentingnya desa ramah bagi pendidikan dan kehidupan sosial anak-anak.
4. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak anak.
6. Belum optimalnya kinerja kelembagaan gender dan anak.
7. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis antara lain:

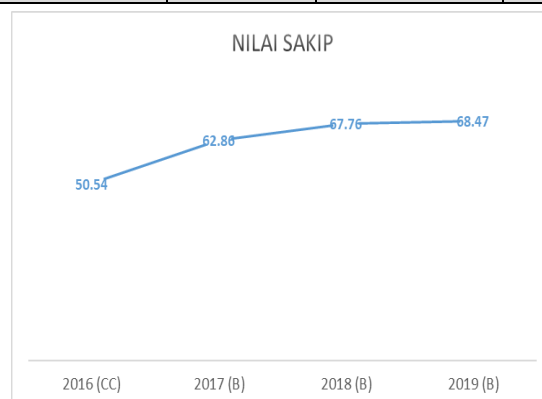
1. Membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat desa/kelurahan dalam penyelesaian kasus kekerasan.
2. Intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan sanksi jika terjadi kekerasan melalui sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan jika terjadi kasus kekerasan.
3. Terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat desa untuk memahami akan arti pentingnya desa ramah bagi pendidikan dan kehidupan sosial anak-anak.
4. Intensifikasi penanganan kasus melalui fasilitas yang ada di P2TP2A seperti: Konsultasi psikologi, pendampingan hukum, konsultasi tokoh agama, pemanfaatan rumah aman bagi korban yang membutuhkan dan rehabilitasi mental di pondok pesantren yang telah bekerjasama dengan P2TP2A.

5. Pengembangan jejaring atau kerja sama di tingkat desa/kelurahan melalui tenaga sukarelawan/Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melalui POS BANTU PPA untuk menerima pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak serta menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dengan Tiga Pilar (Kepala Desa/Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas) dan pendampingan saat korban dalam proses penyelesaian kasusnya apabila kasus dirujuk ke P2TP2A.
6. Terkait pemenuhan hak anak, Dinas PPKBP3A sebagai *lead sector* dan fasilitator akan berusaha lebih intensif berkoordinasi dengan semua elemen, agar ke depan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujud KLA pada tatanan yang lebih tinggi lagi.
7. Mengoptimalkan kinerja kelembagaan gender dan anak disebabkan oleh masih adanya egosentris dimasing-masing kelembagaan gender dan anak yang ada. Dinas PPKBP3A berupaya untuk meminimalisir permasalahan dengan sosialisasi intensif.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan PUG, disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsepsi PUG. Untuk itu di tahun ini Dinas PPKBP3A telah melaksanakan sosialisasi, workshop dan Bimtek tentang PUG dengan sasaran organisasi perempuan seperti P2WKSS, GOW, PKK dan lain-lain serta organisasi remaja.

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Strategis 7 Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai SAKIP	B	BB	B	91,29%	-	BB
Nilai LPPD	3,1238	3,0540	0,0624	100,28%	-	0,0542
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	-	WTP
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				97,19%		

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah 97,19% atau Kategori **Berhasil**. Sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja.



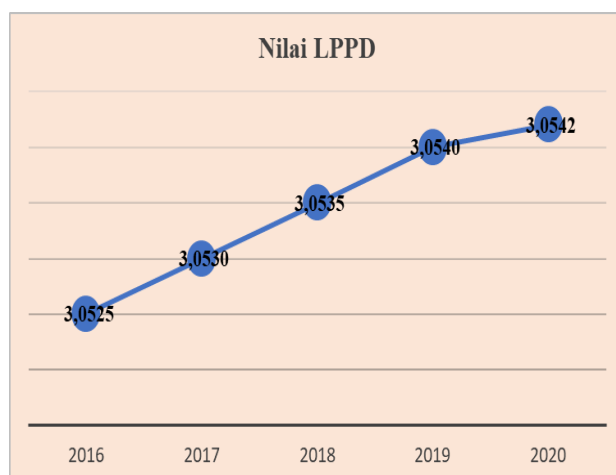
Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama 4 (empat) tahun terakhir, Tahun 2016 nilai SAKIP sebesar 50,54 atau peringkat CC dan akhir tahun 2019 menjadi 68,47 poin atau nilai B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan (*refocusing*) yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

Peningkatan kualitas SAKIP juga dilakukan Inspektorat melalui Evaluasi SAKIP pada 52 OPD tahun 2020 dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan valuasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Tujuannya untuk mengukur *progress* tingkat implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas OPD dan memberi saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja OPD. Fokus evaluasi adalah evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, output, hasil dan manfaat (*outcome*). Hasil evaluasi menunjukkan sebanyak 5 OPD Pelaporan hasil evaluasi menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dan diketahui perbaikan dilakukan.

Peningkatan nilai SAKIP pada tahap Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui peningkatan dua indikator yaitu Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD dan Persentase Renja OPD yang berkualitas baik. Peningkatan dokumen renja yang berkualitas baik didasarkan pada pemenuhan kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan (substansi, sistematika dokumen, dan ketepatan waktu) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kemudian dilakukan evaluasi atas renja perangkat daerah ini dilakukan rutin setiap tahun, dimana pada tahun 2020 sejumlah 42 renja perangkat daerah (80,77%) dinilai sudah sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sejumlah 35 renja OPD (67%) yang sesuai dengan kaidah dokumen perencanaan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Evaluasi RKPD, dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan yang digunakan meliputi : e-Pradah, e-Musrenbang, E-Budgeting, dan Sistem Informasi Evaluasi RKPD.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran akan menggunakan sistem dimaksud, sedangkan pada tahun 2021, implementasi SIPD mulai dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021. Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pada tahun 2018 telah mulai digunakan e-Musrenbang yang memudahkan proses input usulan, verifikasi, dan pleno pembahasan usulan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten

Sasaran strategis berupa Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, juga ditunjukkan dengan indikator Nilai LPPD. Nilai LPPD Kabupaten Blitar menunjukkan pertumbuhan dan kenaikan nilai yang cukup berarti, dan hampir setiap tahun target tersebut dapat di capai. Sedangkan, untuk indikator predikat WTP sebagai indikator penilaian akuntabilitas



pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar mampu mempertahankan predikat WTP ini selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diandalkan.

Penilaian SAKIP dimulai dari perencanaan yang sudah direview oleh Inspektorat, kemudian pelaksanaan dan sampai evaluasi dan pelaporan yang juga akan direview oleh Inspektorat. Dalam pelaksanaan SAKIP, inspektorat aktif melakukan pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Blitar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui audit reguler dan audit kinerja terhadap kegiatan pengelolaan keuangan negara/daerah dan desa. Kegiatan pengawasan reguler direncanakan dilakukan terhadap 171 obrik (24 badan/dinas/Setwan/RSUD/Setda/SD/SMP, 16 kecamatan, 112 desa), kinerja sebanyak 8 obrik dan PDTT (bansos, DAK, Hibah, Bansos) sebanyak 16 obrik. Selain itu, di lakukan Pelaksanaan Evaluasi SPIP dilakukan dengan update register risiko pada 18 OPD.

Upaya meningkatkan nilai SAKIP dilakukan melalui penetapan prioritas program tata kelola pemerintah daerah yaitu evaluasi penerapan Zona Integritas dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi. ZI adalah pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/228/409.06/KPTS/2018 tentang Penetapan Perangkat Daerah yang diusulkan Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 telah menetapkan 11 (sebelas) OPD sebagai pilot *project* Pembangunan Zona Integritas, yaitu : DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dispendukcapil, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Sanankulon, Puskesmas Wlingi dan Puskesmas Srengat. Pada tahun 2020, diajukan 6 (enam) OPD untuk OPD ZI menuju WBK yang masih proses.

- RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan nilai pada PMZI yaitu 86,18
- DPMPTSP dengan nilai pada PMZI yaitu 79,82
- Puskesmas Wlingi dengan nilai pada PMZI yaitu 78,13
- Puskesmas Srengat dengan nilai pada PMZI yaitu 79,43
- BPBJ dengan nilai pada PMZI yaitu 75,48
- Dinas Perhubungan dengan nilai pada PMZI yaitu 78,55

Pelaksanaan amanat Permenpan RB Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Blitar Nomor : 188/130/409.06/KPTS/2019 tentang Pembentukan Tim Asessor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 4 Maret 2019 dilaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebagai bentuk optimalisasi reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*. Selain penilaian mandiri terhadap OPD, Inspektorat selaku assessor PMPRB Kabupaten Blitar juga melaksanakan pendampingan/asistensi ke seluruh OPD sampai dengan kecamatan. Pada tahun 2020 dilakukan penilaian mandiri melalui portal PMPRB MenPAN terhadap 52 OPD namun dilakukan submit dengan OPD sampling sebanyak 10 OPD.

Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan peningkatan pelayanan keuangan untuk mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung PPKD. Maka pada tahun 2020 di-*launching* E-Proklamator (Elektronik Proposal Hibah Kabupaten Blitar Mantap dan Termonitor). Melalui E-Proklamator masyarakat/aparat yang mengajukan hibah dapat

memonitor sampai dimana proses pengajuan hibahnya sehingga lebih mudah dan tidak harus berulang kali mendatangi SKPD tempat pengajuan hibahnya.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang terkait, antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. SAKIP sendiri adalah sebuah siklus sistem dimana dalam proses perencanaan sampai evaluasi harus konsisten dan saling terkait dan mendukung. Adapun detail realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Sekretariat Daerah	30.820.572.845	28.044.015.362	90,99%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.151.002.119	5.268.126.594	85,65%
Inspektorat	8.812.341.358	8.554.796.037	97,08%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.502.176.979	6.332.135.425	97,38%
Serapan Anggaran	52.286.093.301	48.199.073.418	92,78%

Hambatan / Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Adanya *refocusing* anggaran, maka target kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya terutama terkait pemeriksaan OPD.
2. Adanya mandatori diluar perencanaan pengawasan yaitu terkait Pelaksanaan Posh Audit Belanja terkait Anggaran Covid dan adanya situasi pandemic, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi
4. Terkait penilaian SAKIP di tingkat Kabupaten, masih terdapat perangkat daerah yang mendapatkan predikat C, sehingga evaluasi dan pembinaan perlu ditingkatkan.
5. Beban kerja SDM aparatur yang menyusun dan melaporkan LKjIP yang tinggi dan masih banyak menangani semua administrasi di sekretariat.
6. Pemahaman SOP namun beberapa perangkat daerah yang melibatkan tenaga protokol belum seluruhnya memahami SOP tersebut, sehingga koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau event belum seluruhnya dapat berjalan optimal.

7. Penyusunan Pengisian RUP masih belum bisa tepat waktu bisa terpublikasikan semua di awal tahun anggaran dan masih ada kesalahan pengisian SIRUP baik metode maupun jadwal pelaksanaan yang hanya sekedar terisi.
8. Perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang cepat tidak direspon aktif oleh OPD yang bersangkutan.
9. Pemahaman strategi pelaksanaan tender masih lemah

Solusi yang ditempuh menghadapi permasalahan:

1. Peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis dan Pendampingan penyusunan laporan kinerja aparatur dilakukan lebih intensif.
2. Menurunkan target kegiatan yang disesuaikan dengan *refocussing* anggaran.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan posh audit sampai dengan akhir Tahun 2020
4. Pelaksanaan koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi akan diintensifkan mulai Tahun 2021
5. Mengusulkan penambahan personil ke BKPSDM atau mengganti personil yang lebih kompeten dan sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan terutama pada jabatan pelaksana.
6. Mengikutsertakan karya-karya inovasi dalam berbagai ajang pameran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun diseminasi yang lebih intensif perlu ditingkatkan, misalnya melalui media massa (televisi, radio, dan media cetak) maupun perumusan tindak lanjut pengembangan karya inovasi oleh OPD terkait. Selain itu, tingkat kepesertaan Krenotek masih dapat ditingkatkan melalui perpanjangan tahapan sosialisasi yaitu pada tahun 2020 akan dimulai sejak Februari sehingga semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gelaran tersebut.
7. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang diharapkan, koordinasi aktif dari perangkat daerah selaku penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu yang mencukupi sehingga persiapan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.
8. Memberikan pemahaman terkait strategi pengadaan kepada OPD sehingga proses tender/seleksi dapat dilakukan di awal tahun
9. Mengusulkan pengadakan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, baik itu melalui pengangkatan.

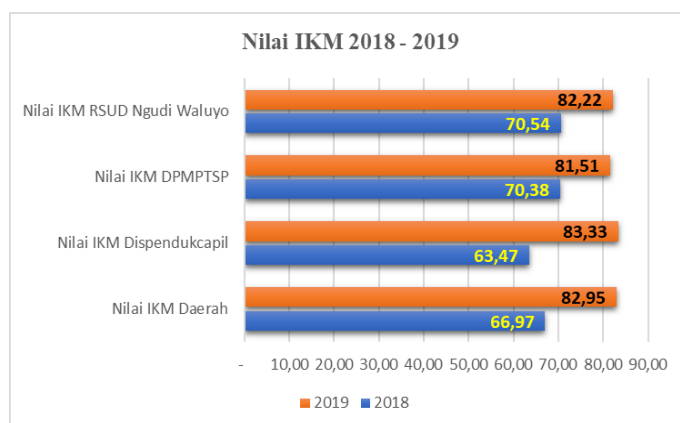
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Strategis 8

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik	100%	-	Sangat Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				100%		

Capaian kinerja sasaran strategis atas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan daerah

setiap tahun. Tahun 2018 SKM dilakukan terhadap 3 perangkat daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan RSUD Ngudi Waluyo. Hasil nilai IKM sebesar 66,97 poin atau kategori Kurang Baik. Berbagai rekomendasi kebijakan diberikan kepada OPD sasaran dan kembali dilakukan SKM pada 4 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hasil SKM tahun 2019 berhasil diperoleh nilai IKM sebesar 82,95 atau Kategori Baik. Survei tahun 2019 digunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup 9 unsur penilaian, sebagai pengganti Nomor 16 Tahun 2014.

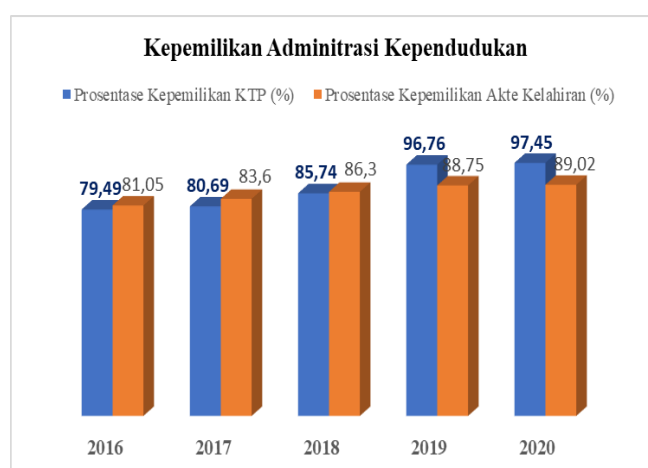
Terakhir tahun 2020, dilakukan survei kepuasan terhadap 5 perangkat daerah dengan hasil nilai rata-rata IKM adalah 80,94 poin. Perangkat daerah sasaran survei di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan diseminasi perangkat daerah yang dilakukan SKM. Adapun hasil rinci sebagai berikut:



Hasil IKM Perangkat Daerah Tahun 2020

No.	Unit Pelayanan	Jumlah Layanan	Indeks Kepuasan	Huruf
1.	Badan Pendapatan Daerah	9	82,09	B
2.	Dinas Perhubungan	1	81,10	B
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	81,60	B
4.	Kecamatan Kanigoro	5	82,24	B
5.	Kecamatan Wonotirto	3	77,67	B
Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan		20	80,94	B

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survei kepuasan tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 79,46 poin yang mana angka ini terus meningkat setiap tahun. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan secara *online* melalui *website* dan aplikasi, sehingga pemohon melalui komputer atau *smartphone* bisa



melakukannya dari lokasi mana saja, cukup dengan melakukan pendaftaran dan *upload* berkas persyaratan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ikut mendorong terwujudnya slogan nasional “Dispenduk Go Digital” yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Beberapa inovasi aplikasi sistem yang dikembangkan antara lain aplikasi E-SIAP, Anjungan Tutul Mandiri (ATM), Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar (AL ASAR), Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman (AKAM), Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar (KAWIN TERBAIK), dan Drive Thru Pelayanan KTP El. Kinerja pemenuhan dokumen kependudukan terus menunjukkan peningkatan prosentase selama 5 tahun terakhir.

Pelayanan terhadap para investor untuk mengajukan perizinan usaha juga terus ditingkatkan kemudahannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di masa Pandemi covid-19 saat ini aktivitas Penanaman Modal dan Proses pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Blitar tetap berjalan seperti biasa dengan selalu melaksanakan protokol Kesehatan. Untuk menjaga

kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 tersebut pada bulan Juni 2020 DPMPTSP Kabupaten Blitar membuat suatu Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu “ Ini Baru Joss Banget Mas “ yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan izin usaha hanya di rumah saja meskipun pada malam hari. Proses perizinan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Pemohon izin mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan karena adanya BLT dari pemerintah pusat yang mempersyaratkan adanya legalitas usaha. Meski demikian, realisasi investasi tahun 2020 dapat tercapai dan melampaui target dimana teralisasi Rp.1.302 milyar dengan target hanya Rp.35 milyar. Jumlah investor yang melampaui target dari 3 investor terealisasi sebanyak 8 investor.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi *leading sector* dalam pengembangan Kabupaten Blitar sebagai *Smart City*. Regulasi yang menjadi dasar pengembangan adalah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2028 dan disusul dengan terbitnya menerbitkan 5 regulasi terkait *smart city*. Infrastruktur pendukung terus dibangun agar setiap perangkat daerah mampu memiliki dan mengembangkan aplikasi sistem digital dalam mempermudah pelayanan. Command center, Data center dan jaringan telah terintegrasi di Kabupaten Blitar yang mencapai total titik koneksi sebanyak 141 titik melalui fiber optik. Fasilitas *Teleconference* untuk menunjang kinerja di era industry 4.0 dibutuhkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Dalam pelayanan publik, dibangun Layanan Mandiri Surat untuk mempermudah layanan masyarakat secara virtual di kantor desa. Pada tataran aplikasi program, dibangunnya satu dashboard *smart city* yang menyatukan seluruh aplikasi penunjang pilar *smart city*. Beberapa aplikasi baru dikembangkan tahun 2020 antara lain aplikasi SIK, e-tani, Aplikasi smart map, Aplikasi Sikanda, e-budgeting, Amazing Blitar. Aplikasi ini melengkapi jumlah aplikasi sistem yang ada hampir mencapai 30 sistem. Pada masa pandemi, sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/656/409.02/KPTS/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Adminduk Calon Penerima Bansos Terdampak Covid-19, inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan kolaborasi antara Bidang Data dan Statistik dengan Bidang Informatika adalah membuat aplikasi Jaring Bansos yang memberikan manfaat luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Blitar dalam penanganan covid-19 dalam hal data penerima bansos.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.825.887.000	4.198.290.751	87,00%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8.178.814.913	7.788.213.030	95,22%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Dinas Pendidikan	765.941.599.542	753.818.001.585	98,42%
Sekretariat DPRD	30.820.572.845	28.044.015.362	90,99%
Dinas Kesehatan	258.686.542.584	231.615.168.773	89,54%
RSUD	178.946.060.576	205.263.338.923	87,18%
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.992.033.233	8.947.942.001	99,50%
Badan Pendapatan Daerah	39.969.869.891	39.330.663.901	98,40%
Serapan Anggaran	1.297.595.074.865	1.280.198.974.813	93,66%

Hambatan/Kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Cakupan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan masih sangat kurang, beban kerja pegawai sangat tinggi dan akibatnya pelayanan tidak maksimal.
2. Sarana dan prasarana pelayanan di Dispendukcapil masih sangat kurang. Jumlah pelayanan rata-rata perhari mencapai ± 500 orang, kondisi ruang yang ada sangat kurang memadai. Ruang minimal loket penerimaan dan pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi, meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan tempat antrian. Tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang administrasi perkantoran. Fasilitas lainnya, ruang pertemuan, ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok.
3. Masih perlunya ditingkat *mindset* dan kompetensi pemberi layanan, dimana hampir semua proses perizinan sudah menggunakan aplikasi sistem online.
4. BKPSDM masih belum memiliki ketersediaan data kepegawaian mutakhir yang dapat cepat disajikan dan diakses. Akibatnya data kepegawaian belum dapat

dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengembangan pola karier dan jabatan PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

5. Belum adanya peta tentang kebutuhan kompetensi dan strategi pengembangan kompetensi ASN sehingga belum dapat ditentukan peta kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan oleh ASN.
6. Ketergantungan daerah terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat baik Tingkat Provinsi maupun Instansi Pembina (Kementerian) masih sangat tinggi, sehingga tidak bisa mandiri dalam menyelenggarakan/mengirim peserta Diklat.
7. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem elektronik atau Online Single Submission (OSS).
8. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan kompeten di bidang teknologi informasi masih sangat kurang.
9. Masih belum stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan mengenai internet.
10. Kurangnya pemahaman masyarakat (Wajib Pajak) terkait regulasi Pajak Daerah di Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:

1. Dilakukan usul penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya dibutuhkan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan *bezzeting* atau pemetaan kebutuhan aparatur, saat ini masih kurang 25 personil.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan untuk kompeten dan memiliki *mindset* melayani kepada masyarakat secara lebih baik.
3. Pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik harus terus dilakukan mengingat luas wilayah Kabupaten Blitar dan sebaran penduduk ke pelosok wilayah Blitar, maka salah satu cara meningkatkan layanan dan mengurangi waktu tunggu adalah dengan menggunakan aplikasi sistem dan desentralisasi pelayanan ke kantor kecamatan.
4. Gudang arsip dokumen kependudukan telah diusulkan pembangunannya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus digitalisasi (alih media) data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman. Manajemen arsip digital sangat penting dalam pengelolaan arsip kependudukan, sebab selain untuk menjaga keberlangsungan pengendalian kependudukan, juga agar mudah dalam penggunaan

untuk tujuan pengawasan dan pengendalian data migrasi penduduk.

5. melakukan proses penyempurnaan dan pemutakhiran data kepegawaian pada SIMPEG agar dapat disajikan dengan cepat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan untuk pola pengembangan dan penataan karier PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Dengan menyusun standar kompetensi sesuai dengan analisa jabatan sehingga identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi bagi ASN sesuai peran dari BKPSDM sebagai Unit Kerja yang bertugas mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan kompetensi ASN.
7. Pemerintah Daerah melalui BKPSDM lebih intensif melakukan koordinasi baik ke Lembaga Penyelenggara Diklat Kementerian, Provinsi Jatim maupun Provinsi lain agar penyelenggaraan maupun pengiriman peserta diklat Pemerintah Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan lancar dan anggaran dapat terealisasi dengan maksimal
8. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
9. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
10. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
11. Pada tahun 2020, Dinas Kominfo telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan merekrut dua orang tenaga programmer dan satu orang desainer grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan membuat aplikasi-aplikasi sederhana guna mempermudah dan mendukung kinerja OPD. Selanjutnya secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis, maupun kegiatan lain yang berpotensi menambah kemampuan sumberdaya aparatur OPD.
12. Ke depan akan dilakukan *backup* jaringan maupun *assesment* jaringan ke OPD-OPD untuk evaluasi permasalahan dan rekomendasi penyelesaian sehingga gangguan internet dapat diminimalisir. Selain itu, juga akan ditingkatkan kualitas infrastruktur jaringan melalui *fiber optic* sehingga komunikasi lebih lancar.
13. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha, aparat pemerintahan dan masyarakat mencakup seluruh kecamatan, serta monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Beberapa perangkat daerah pelayanan publik secara intensif melakukan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 10 jenis inovasi dalam pelayanan kependudukan, antara lain: 1) E-SIAP; adalah tonggak menuju “Dispenduk Go Digital”, yaitu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* melalui *website* dan aplikasi; 2) ATM; Anjungan Tutul Mandiri (ATM) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* dimana pemohon secara mandiri melakukan pengajuan pelayanan melalui mesin anjungan yang tersedia; 3) AL ASAR; Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar (AL ASAR), yaitu pelayanan akta kelahiran baik melalui bidan desa ataupun aplikasi E-SIAP dimana akta kelahiran diterbitkan paling lambat 7 hari setelah lahir; 4) AKAM; Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman (AKAM) merupakan pelayanan penerbitan akta kematian secara cepat dimana PRD mengirimkan berkas persyaratan melalui aplikasi *WhatsApp*; 5) KAWIN TERBAIK; Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar (KAWIN TERBAIK), pelayanan akta perkawinan yang Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4) untuk selanjutnya diterbitkan akta perkawinan yang diserahkan setelah pelaksanaan Ikrar Pernikahan; 6) Pelayanan Adminduk di Kecamatan; Pelayanan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilayani di kecamatan, salah satunya Cetak Kartu Keluarga; 7) Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan (PRD); Pembentukan petugas registrasi yang berfungsi sebagai verifikator awal pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan, pembagian nomor antrian pelayanan dan memonitor perkembangan berbagai peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan; 8) Tempat Layanan Adminduk (TLA); Tempat Layanan Adminduk terbagi menjadi dua yaitu wilayah Barat (Kecamatan Srengat) dan wilayah Timur (Kecamatan Wlingi); dan 10) Pelayanan Keliling; Pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan Jemput Bola (JEBOL) dilaksanakan dengan mendatangi lokasi-lokasi ditetapkan kantor desa, sekolah, lembaga pemasyarakatan, sehingga diharapkan mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan; dan 11) Monitor Display Data Kependudukan.



Dinas Komunikasi dan Informatika juga agresif melakukan inovasi pelayanan sampai tahun 2020, Kabupaten Blitar kembali berhasil meraih penghargaan **Badan Publik Menuju Inovatif** dalam **PPID Award Tingkat Provinsi Jawa Timur**. Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 *smart city* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Smart city* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Dengan mengambil visi cepat, nyaman, dan sejahtera, Kabupaten Blitar telah menyepakati dilaksanakannya 3 *Quick Win* di dalam reformasi birokrasi tahun 2020 yaitu : Aplikasi Jaring Bansos, aplikasi KANG JIMBANG uji tera mudah dan gratis dan aplikasi JOS BANGET MAS untuk perizinan secara digital.



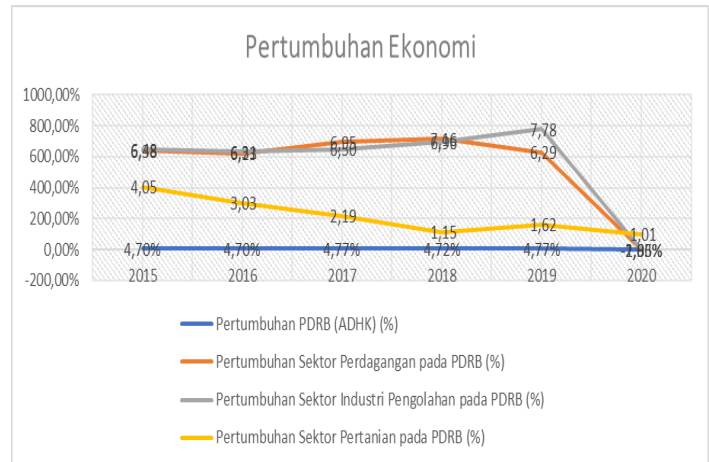
Tahun 2020 di-*launching*/mulai diterapkan aplikasi *software system* “Ini Baru Joss Banget Mas” (nama inovasi), sebuah inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan izin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Inovasi lain aplikasi *software* Digital Signature melalui Aplikasi ImobilV2, mewujudkan kemudahan akses pelaku usaha pemenuhan komitmen izin usaha OSS dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemrosesan pelayanan perizinan dengan membuat Inovasi “**Fast DS**” yaitu inovasi aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik berbasis website. Sudah terealisasinya penerapan *Digital Signature* dalam pelayanan perizinan di DPMPSTP Kabupaten Blitar, pelaku usaha tidak lagi ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis izin usahanya dan pelayanan pemrosesan perizinan akan lebih efektif dan efisien dalam 1 hari. Pengembangan berbagai aplikasi sistem pelayanan tersebut sebagai bagian dari *road map* pengembangan *master plan smart city* Kabupaten Blitar.

Sasaran : Meningkatkan Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM
Strategis 9 Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,29	7,03	-7,25	0%	-	7,23
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,78	7,13	-5,26	0%	-	7,38
Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	1,62	3%	0,06%	2,00%	-	3,00
Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp.000)	5.742.647	2.194.367	3.776.719	172,11%	-	4.980.712
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				43,53%		

Capaian rata-rata kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata adalah 43,53% atau Kategori **Kurang Berhasil** jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) buah. Penyebab utama ini adalah adanya resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19 tahun 2020. Pandemi berdampak pada seluruh kehidupan tidak terkecuali perekonomian daerah, yaitu Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi menjadi -2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5,1%. Pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan yaitu dari 31,4 juta pertahun menjadi 30,93 juta pertahun untuk ADHB dan untuk ADHK tahun 2010 turun dari 21,99 juta pertahun menjadi 21,42 juta pertahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar ini memberikan dampak terhadap beberapa indikator ekonomi sektoral antara lain angka pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB yang berkontraksi -7,25% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% dan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang berkontraksi -5,26 yang juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,13%. Sedangkan, angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB yang masih tumbuh lambat sebesar 0,06% yang juga di bawah target daerah yaitu 3%. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini tidak mampu memenuhi target kinerja daerah dalam laporan akuntabilitas kinerja daerah.

Sampai dengan tahun 2019, pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan sektor perdagangan terus tumbuh meningkat signifikan yaitu 7,78% dan 6,29%. Rata-rata angka pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan adalah 6,60% dan sektor industri pengolahan sebesar 6,81%. Sedangkan, pertumbuhan sektor pertanian meskipun memiliki kontribusi PDRB yang besar, tetapi memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang rendah yaitu hanya 1,62% pada tahun 2019 dan hanya rata-rata 2,41%. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor pengungkit tumbuh signifikan sampai dengan tahun 2019.

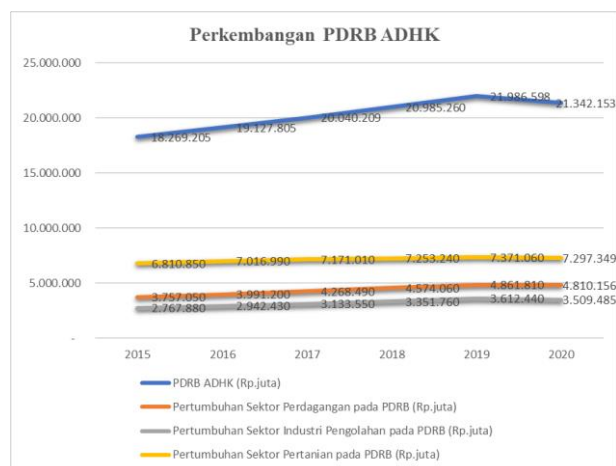


Tahun 2019 nilai PDRB sektor perdagangan memberikan sebesar Rp.5.861,810 milyar, untuk sektor industri pengolahan memberikan kontribusi masih Rp.3.612,440 milyar terus merangkak naik rata-rata 6,60% pertahun sampai tahun 2019 dan terakhir sektor pertanian masih memberi kontribusi signifikan yaitu Rp.7.371,060 milyar.

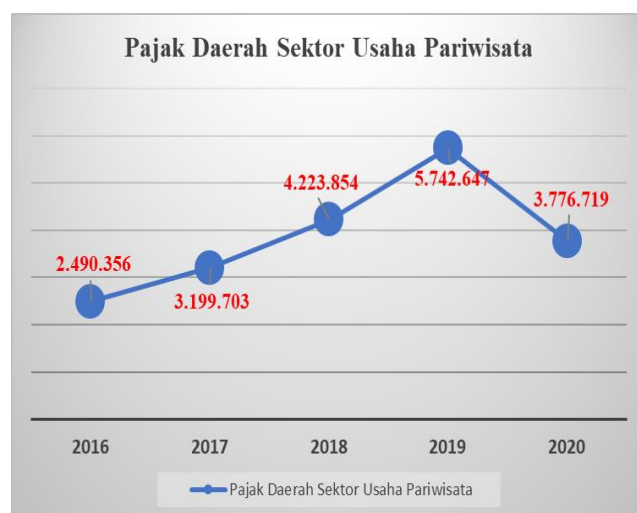
Akan tetapi, semua berubah drastis pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghancurkan seluruh sendi-sendi perekonomian global sampai ke daerah. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkontraksi -2,29% pada Q pertama dan lebih parah menjadi -5,96% pada Q2, akan tetapi pada Q3 mulai adanya kenaikan 5,86% sehingga angka C to C berkontraksi -2,29%. Demikian pula di Kabupaten Blitar yang hasil prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berkontraksi -2,46%. Kontraksi ekonomi ini segera diikuti oleh penurunan berbagai sektor ekonomi terutama yang memberi kontribusi besar PDRB antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan pertanian. Angka pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB berkontraksi -7,25% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% yaitu sebesar Rp.4.509,51 milyar disusul dengan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berkontraksi -5,26 yang juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,13% atau nilai PDRB tahun 2020 sebesar 3.422,52 milyar. Dan terakhir, angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB masih mengalami adanya pertumbuhan rendah sebesar -0,06% yang juga di bawah target daerah yaitu 3% dengan PDRB sebesar Rp.7.375,20 milyar. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini bahwa target yang tidak tercapai disebabkan adanya faktor eksternal ekonomi global yang

tidak dapat dikendalikan oleh daerah meski berbagai kebijakan *refocusing* sudah dilakukan dengan massif dan baik.

Sedangkan untuk indikator Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan, menunjukkan realisasi yang melebihi target dengan capaian 123,42%. Pajak daerah yang masuk kategori sektor usaha pariwisata adalah dari jasa akomodasi dan perhotelan serta jasa makan minum. Realisasi pajak sektor usaha pariwisata ini terus mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 32,5%. Tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp.2.490,36 juta, kemudian tahun 2017 naik signifikan menjadi 3.199,703 juta dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 5.742,67 juta. Akan tetapi tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, dampaknya aktivitas ekonomi dan bisnis menjadi macet. Jikapun ada kegiatan harus dengan protokol yang sangat ketat. Pandemi ini berdampak massif dan luas di sektor pariwisata. Wilayah Kabupaten Blitar, terdapat surat edaran Bupati Blitar Nomor 331.1/3627/409.120/2020 untuk menutup seluruh tempat wisata di Kabupaten Blitar di



tahun 2020. Hal ini tentu berdampak penerimaan pajak sektor usaha pariwisata ini sehingga capaian kinerja indikator ini tidak mampu dicapai. Tahun 2020, realisasi pajak dari sektor pariwisata sebesar Rp. 3.777.719.000,- yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 71.423.069, Pajak Restoran sebesar Rp. 3.051.130.383,- dan Pajak Hiburan dengan nilai realisasi sebesar Rp.654.165.425,-.



Data indikator Penerimaan Pajak Daerah dari Usaha Kepariwisata di Kabupaten Blitar juga menunjukkan pertumbuhan nilai dan prosentasenya. Pajak ini diperoleh dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang penyediaan sarana dan prasarana serta akomodasi bagi wisatawan. Jika tahun 2016 jumlah pajak sebesar Rp. 2,49 milyar, telah terjadi pertumbuhan sebesar rata-rata 32,15% pertahun hingga tahun 2020 telah mencapai nilai

Rp. 4,274 milyar. Peningkatan pajak daerah ini sebagai dampak dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan/pengunjung yang tetap tumbuh di berbagai destinasi di Kabupaten Blitar dengan protokol yang sangat ketat. Tahun 2017 jumlah wisatawan sebanyak 1.727.953 kunjungan yang terus meningkat rata-rata 26,31% setiap tahun selama 3 tahun terakhir, sampai tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 2.754.998 kunjungan.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 diselaraskan dengan tetap mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keluarnya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 sebagai pedoman tatan baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan *refocusing* anggaran sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah untuk tetap menjaga kestabilan antara tujuan kesehatan (keselamatan) dan ekonomi. Inovasi program dan kegiatan terus dilakukan oleh berbagai perangkat daerah. Salah satu inovasi agresif dan massif di masa pandemi covid-19 adalah dengan mengembangkan berbagai aplikasi sistem *software* pelayanan. Inovasi untuk tetap mendorong aktivitas pedagang pasar yang tinggi ini adalah Komitmen Bupati Blitar bertempat di Pasar Wlingi dengan *melaunching* “Kang Jimbang” atau Tukang Uji Timbangan oleh Bupati Blitar. Kang Jimbang, petugas penguji timbangan akan mulai bergerak aktif melakukan tugasnya ke berbagai lokasi di Kabupaten Blitar, di pasar, SPBU dan Wajib Tera Utang yang lain, sehingga Kang Jimbang Datang Masyarakat Tenang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan dukungan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif melalui pembentukan wirausaha muda. Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan USAID melaksanakan program USAID JAPRI (Jadi Pengusaha Muda). Sistem perekrutan peserta dilakukan secara *online*, dengan materi berupa BMW (*Bussiness Motivation Workshop*) BMC (*Bussiness Model Canvas*), ToT (*Training of Trainer*), ToC (*Training of Coach*), *Mentoring* dan *Coaching* kepada peserta untuk rentang waktu selama enam bulan. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dibuktikan sejumlah 300 orang mendaftar, dan setelah melalui berbagai tahapan seleksi terpilih 40 orang WUB (Wira Usaha Baru). Juga diluncurkan program ABANGWIRA (Audisi Pengembangan Wirausaha) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (2019-2020) yang menysasar wirausaha muda yang telah merintis usaha dengan tujuan untuk menaikkan *omzet*. Dari tahapan audisi, dari 300 orang pendaftar terseleksi sejumlah 50 orang. Program

kegiatan tersebut mampu mendukung capaian kinerja berupa jumlah Usaha Mikro (unit) yang mencapai 255.206 unit dan melampaui target sebanyak 254.287 unit atau 100,36%.

Dinas Pertanian juga melakukan *refocusing* anggaran untuk prioritas program dan kegiatan pendukung kinerja. Sektor pertanian tanaman pangan padi sawah terus mengalami penurunan hasil produksi yaitu dari target 340.749 ton hanya mampu direalisasikan 294.454 ton atau 86,41%. Demikian juga untuk padi ladang hanya mampu diproduksi 25.929 ton atau 64,91% dari target 39.940 ton. Sedangkan, untuk tingkat produktivitas masih tercapai target yaitu 68 kuintal/ha yang melebihi target sebesar 66,5 kuintal/ha. Terjadi pergeseran tren perubahan komoditas tanaman, dimana jenis produksi tanaman padi terus menurun selama 3 tahun terakhir berganti menjadi tanaman jagung dan umbi-umbian yang terus meningkat yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi tahun 2017 sebanyak 423.485 ton terus menurun menjadi 320.383 ton tahun 2020. Hasil tanaman jagung tahun 2017 sebanyak 320.544 ton naik menjadi 391 ton tahun 2020. Demikian juga tanaman kedelai dari 9.055 ton tahun 2015 naik signifikan menjadi 14.959 ton tahun 2020, dan bahkan untuk ubi kayu dari 76.157 ton naik drastis menjadi 121.902 ton tahun 2020 atau naik 1,6 kali lipat. Ubi jalar meningkat tajam dari 3.486 ton tahun 2015 menjadi 81.140 ton pada tahun 2020 atau naik 23 kali lipat 3 tahun terakhir.

Sektor pertanian didukung berbagai program penguatan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Program prioritas yang dilakukan antara lain pengembangan desa mandiri pangan, penguatan kelembagaan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, usaha pangan masyarakat, pemantapan pola konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan masyarakat. Penguatan Ketersediaan Pangan basis Umbi-Umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di desa. Konsep kegiatan adalah dengan pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pengembangan aneka sayuran, umbi, rempah dan obat untuk meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan pendapatan dan gizi keluarga di tingkat rumah tangga, sehingga rasio ketersediaan pangan dan terpenuhi kebutuhan Energi dan Protein meningkatkan Skor PPH di tahun mendatang.

Sub sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan juga melakukan *refocusing* anggaran, dengan tetap berupaya mengembangkan program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja bidang peternakan. Program pencegahan dan penanganan penyakit menular hewan dapat dilakukan melebihi target dari 45.000 dapat terealisasi 49.500 hewan atau 81,5% dari seluruh populasi hewan. Peningkatan

produksi peternakan juga menjadi target kinerja yang direncanakan hanya sebanyak 2.442 sasaran ternyata mau dibina 3.581 orang sasaran atau melebihi 100% dari target. Demikian pula pada program pemasaran produk, dari target hanya 26 usaha atau kelompok ternah, ternyata mampu direalisasikan sebanyak 30 kali kegiatan. Pada program pengawasan mutu ternak, dapat direalisasikan di atas 100% yaitu dari target sebesar 10.110 ternak yang ditargetkan, dapat terealisasi 16.114 ternak. Akan terkait program prioritas yaitu pembinaan lingkungan sekitar, maka tidak mampu dicapai target, dimana dari 320 kali target kegiatan tetapi hanya terealisasi 313 kali. Dukungan tambahan kinerja sub sektor peternakan adalah banyak investor yang memilih usaha di bidang peternakan.

Terkait dengan hasil produksi ternak, terjadi kenaikan selama 3 tahun berjalan, baik untuk daging, susu maupun telur. Kabupaten Blitar adalah salah satu lumbung telur dan daging di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,93% dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi kemudian turun pada tahun 2020 sebesar -2,780% karena tingkat konsumsi juga menurun akibat Pandemi Covid-19.

Jumlah Produksi Ternak

Komoditi	2018	2019	2020
Daging (Ton)	61.121,14	61.217,44	43.291,49
Susu (Ton)	34.928,82	35.630,16	40.392,24
Telur (Ton)	164.927,79	174.389,19	179.962,40
Jumlah (Ton)	260.977,75	271.236,79	263.646,14

Sementara itu, terkait dengan populasi ternak dan unggas, tetap terjadi kenaikan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 sebanyak 25,48 juta ekor naik sebesar 2,61% pada tahun 2019 menjadi 26,15 juta ekor dan terus meningkat pada masa pandemi covid-19 sebesar 9,75% sehingga menjadi 28,70 juta ekor. Populasi ternak di Kabupaten Blitar masih tetap bertahan di masa pandemi, meskipun jumlah hasil produksi menurun akibat dari tingkat konsumsi masyarakat menurun. Menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sudah masuk mempengaruhi tingkat konsumsi makanan pokok masyarakat.

Jumlah Populasi Ternak dan Unggas

No	Jenis Ternak	Satuan	2018	2019	2020
1	S a p i Potong	Ekor	156.386	151.164	151.720
2	Sapi Perah	Ekor	15.780	16.973	19.260
3	Kerbau	Ekor	1.820	1.620	1.510
4	B a b i	Ekor	8.200	9.346	9.620

5	Kambing	Ekor	154.100	154.200	154.800
6	D o m b a	Ekor	7.120	7.150	8.610
7	Ayam Ras Petelor	Ekor	16.800.000	17.076.200	19.060.000
8	Ayam Bukan Ras	Ekor	2.620.400	2.675.400	2.925.300
9	Ayam Ras Pedaging	Ekor	4.015.200	4.022.800	3.820.600
10	I t i k	Ekor	1.180.000	1.476.000	1.960.000
11	Entok	Ekor	76.800	76.900	73.200
12	Puyuh	Ekor	445.200	479.000	512.000
Jumlah			25.483.024	26.148.772	28.698.640

Populasi ternak dan unggas, masih tetap didominasi oleh 4 jenis unggas dimana sampai tahun 2020 adalah ayam ras petelor sebanyak 19.060.000 ekor, ayam bukan ras sebanyak 2.925.300 ekor, ayam ras pedaging 3.820.600 ekor, dan itik sebanyak 1.960.000. Tiga dari 4 jenis unggas menunjukkan tren jumlah populasi yang meningkat. Tren kenaikan populasi unggas tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah itik dengan rata-rata 14,07%, disusun ayam ras petelor sebesar 3,40%, kemudian ayam ras pedaging sebanyak 1,03% dan terakhir adalah ayam bukan ras yang meningkat hanya 0,76% pertahun.

Pada sub sektor perikanan tangkap, tahun 2020 tercapai target 63,44% dan jika dibandingkan dengan hasil tangkap tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 64,3%. Nilai produksi perikanan tangkap juga mengalami penurunan sebesar 31% jika dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi tahun 2020 ini disebabkan oleh cuaca la nina telah menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut yang membuat ikan menjauh dan dampak/ efek pandemi membuat konsumsi ikan masyarakat menurun, akses ekspor tutup dan nelayan belum memiliki tempat penyimpanan ikan tangkapan yang memadai. Untuk sub sektor perikanan budidaya teraliris target di atas 100%, meskipun dibandingkan tahun 2019 untuk produksi perikanan konsumsi mengalami penurunan 5%. Nilai produksi perikanan budidaya tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan 11,9% dari Rp. 355.381.660.000,00 menjadi Rp. 313.049.220.000,00. Hal ini menunjukkan apabila harga produksi perikanan konsumsi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan melemahnya permintaan ikan konsumsi sebagai efek pandemi Covid 19 yang berakibat melemahnya daya beli masyarakat. Solusi yang diupayakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar adalah melalui pembinaan pengolahan sebagai peningkatan kualitas mutu produk serta memfasilitasi sebagai bahan bantuan di era pandemi .

Sebaliknya, untuk komoditi ikan hias efek pandemi covid-19 justru mengakibatkan tingginya permintaan ikan hias sehingga produksi ikan hias tahun 2020 mencapai

224.127.4450 ekor naik sebesar 1,3% dibandingkan Tahun 2019 yang terealisasi 221.247.130 ekor. Nilai produksi juga mengalami kenaikan dari Tahun 2019 Rp. 232.582.200.000,00 menjadi Rp. 236.593.050.000,00 naik (1,7%). Dibandingkan prosentase peningkatan produksi dan prosentase kenaikan nilai diperoleh prosentase kenaikan nilai lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kenaikan harga ikan hias yang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Dengan kenaikan harga ikan hias diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat perikanan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan Bupati Blitar.

Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar yaitu program Kang Jimbang, Abang Marko dan Abang Informal sebagai upaya untuk mengembangkan dan menata manajemen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan, Dinas Peternakan dan Perikanan melaunching Pelayanan Kesehatan Hewan melalui program Reaksi Keren dan Cepat (Kawan Kece) yang mempermudah pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Beberapa Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.172.112.050	6.060.392.695	84,50%
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.607.788.498	5.210.879.410	92,92%
Dinas Pertanian dan Pangan	738.176.000	734.369.775	99,48%
Dinas Peternakan dan Perikanan	6.763.994.558	6.273.319.051	92,75%
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	995.470.000	928.995.500	93,32%
Serapan Anggaran	21.277.541.106	19.207.956.431	90,27%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih belum tersedia data sektoral IKM yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan pengembangan.
2. Unit Metrologi Legal Kabupaten Blitar belum memiliki database potensi WTU.
3. Database koperasi yang akurat sulit belum ada karena beberapa alamat sulit ditemukan dan terbatasnya tenaga pendata.

4. Masih minimnya kemampuan koperasi untuk bergerak di sektor riil.
5. Tingkat partisipasi sekolah dalam lomba perkoperasian masih rendah, terutama sekolah-sekolah yang berlokasi jauh dari pusat ibukota.
6. Proses regenerasi pengurus koperasi masih lemah.
7. Masih belum memasyarakatnya pola penganekaragaman pangan di masyarakat Kabupaten Blitar yang tercermin dari skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100.
8. Terbatasnya ketersediaan air irigasi untuk mencukupi kebutuhan di seluruh lahan pertanian di sepanjang tahun dari sumber sumur dalam, sumur dangkal, jaringan irigasi tersier (JIT), DAM Parit, embung, dan lain-lain.
9. Kemampuan petani melakukan budidaya pertanian untuk menunjang peningkatan intensitas tanam dan kemampuan petani melakukan pengolahan secara sempurna lahan pada areal persawahan yang mempengaruhi kualitas tanah, masih sangat terbatas.
10. Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas (unggul) dan penyediaan pakan serta kualitas bahan pakan ternak masih rendah dan tidak stabil.
11. Ketergantungan bahan pakan/obat-obatan pada impor negara lain, misalnya bungkil kedelai (BK) dan *meat bone meal* (MBM) dan antibiotika, sangat tinggi.
12. Tingginya ancaman penyakit hewan strategis, yaitu Antrax, ASF dan Flu Burung (AI)
13. Jumlah puskesmas, tenaga penyuluh dan sarana serta prasarana pencegahan penyakit hewan masih kurang.
14. Sistem pengelolaan usaha peternakan yang masih bersifat tradisional dan belum ramah lingkungan.
15. Kurangnya promosi ternak dan produk peternakan serta minimnya informasi harga komoditas peternakan akurat sehingga fluktuasi harga produk peternakan yang tinggi.
16. Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi pengolahan produk hasil peternakan.
17. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pengawasan/monitoring pemotongan hewan qurban, misalnya alat bedah yang relatif sederhana (*cutter*), mekanisme pelaporan yang manual (by sms/wa) dan 1 (satu) orang petugas pemantau yang bertugas untuk 1 (satu) desa dengan waktu pemotongan yang serentak sulit untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem (sebelum pemotongan).
18. Masih adanya masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil.

19. Pola penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih berorientasi pada penangkapan harian sehingga daerah penangkapan hanya sekitar pantai, belum dapat menjangkau lokasi penangkapan yang lebih jauh.
20. Harga pakan pabrik masih relatif mahal, hal ini merupakan kendala besar dalam suatu siklus produksi perikanan, sehingga biaya produksi relatif tinggi.
21. Akses pembudidaya terhadap informasi kebijakan pemerintah dan permodalan perbankan masih rendah.
22. Belum adanya tim ahli cagar budaya dan tenaga administrasi di Museum Daerah.
23. Masih terbatasnya pengembangan akses dan obyek wisata di titik-titik wisata terkendala status kepemilikan lahan.
24. Masih lemahnya promosi daya tarik wisata Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembinaan, dengan pembentukan grup-grup pembinaan dengan memanfaatkan media sosial telah dirintis dan dikembangkan sebagai pembinaan, konsultasi dan koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar.
2. Memanfaatkan sampling obyek data IKM sebagai dasar melakukan pembinaan ke daerah maupun pendataan melalui grup-grup media sosial.
3. Pengembangan database sektoral IKM, koperasi, dan peta potensi WTU yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan pengembangan
4. Koordinasi aktif dengan Forum UMKM maupun Dewan Koperasi Daerah terkait rencana penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis/kegiatan sejenis.
5. Meningkatkan volume dan cakupan tenaga pendamping, proses pendampingan, pelatihan dan monitoring evaluasi.
6. Memasyarakatkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dan memperbanyak kegiatan penyuluhan, pembinaan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
7. Aktif berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah tingkat SLTA dalam kegiatan koperasi.
8. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang sehingga pengembangan budidaya serelia maupun umbi-umbian dapat dilakukan secara optimal serta membangun koordinasi dan kerjasama intersif dengan stakeholder terkait pangan dan gizi

diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan

9. Meningkatkan pembangunan sistem irigasi melalui pembangunan JIT (Jaringan Irigasi Tersier), Irigasi Air Tanah Dangkal, Dam Parit dan melakukan rehab pintu air sehingga petani dapat melakukan pembagian atau pengaturan stok air irigasi pada musim kemarau.
10. Meningkatkan pelatihan bagi petani, khususnya pelatihan budidaya pertanian yang dapat menunjang peningkatan intensitas tanam.
11. Sosialisasi dan fasilitasi perubahan sistem pengolahan lahan secara sempurna secara bertahap dilakukan perubahan menjadi pengolahan lahan secara sederhana, dan dukungan kecukupan alat pengolahan lahan seperti traktor atau tenaga kerja untuk pengolahan lahan perlu diperhatikan.
12. Menerapkan program UBSUS SIWAB, yang mewajibkan betina produktif wajib bunting dengan *drooping straw* berkualitas/bibit unggul dari Provinsi secara gratis diharapkan bisa memberikan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas baik.
13. Koordinasi dengan pihak terkait baik peternak, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Kementan dan BULOG dalam rangka memantau ketersediaan bahan pakan ternak berkualitas
14. Penyediaan sarana pengujian berupa laboratorium pakan ternak yang terakreditasi diharapkan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat dalam mengontrol kualitas pakan yang diberikan.
15. Pembinaan dan Pelatihan penerapan teknologi pakan ternak dengan memanfaatkan bahan pakan lokal serta pembinaan dan pelatihan terkait pemanfaatan sumber daya lokal seperti fitobiotik (contoh: jamu-jamuan), probiotik, prebiotik, asam laktat (contoh: ekstrak belimbing wuluh).
16. Ancaman penyakit hewan strategis dapat dicegah dengan pembinaan, pelatihan serta pemberian vaksin berserta desinfektan gratis untuk biosecurity-nya.
17. Melakukan pengajuan tenaga jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam rangka mengatasi keterbatasan SDM Puskesmas serta sarana dan prasarana pencegahan penyakit hewan.
18. Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait usaha peternakan yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan usaha peternakan modern yang menerapkan teknologi serta

pengolahan produk non pangan asal hewan sehingga diperoleh produk hasil peternakan yang bernilai tinggi.

19. Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan akibat pencari ikan diperairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, pelatihan pembuatan jaring ikan sehingga dapat membantu nelayan untuk melakukan penangkapan ikan lebih maksimal.
20. Memfasilitasi bantuan bagi kapal penangkapan ikan melalui kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat.
21. Memperluas dan menambah intensitas pelaksanaan kegiatan “Gemar Makan Ikan” sehingga dapat mempromosikan budaya konsumsi ikan dan produk olahannya yang diharapkan dapat mendorong permintaan produk perikanan dan tingkat konsumsi ikan pada masyarakat.
22. Pelatihan tentang pembuatan pakan ikan utamanya memanfaatkan bahan pakan lokal.
23. Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan pada Unit Pembenihan Ikan dan pengadaan indukan koi unggul.
24. Mensosialisasikan dan memaksimalkan Perda Cagar Budaya, dan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi guna penetapan cagar budaya.
25. Melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (instansi vertikal maupun swasta).
26. Meningkatkan upaya-upaya promosi untuk mengangkat potensi wisata di Kabupaten Blitar, salah satunya memunculkan *icon* wisata kabupaten Blitar.
27. Penyusunan rencana kebutuhan lahan dan anggaran (pengadaan tanah) dalam pengembangan akses infrastruktur dan sarana prasarana di obyek wisata.

Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Perijinan Strategis 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	Baik	100%	-	Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				100%		

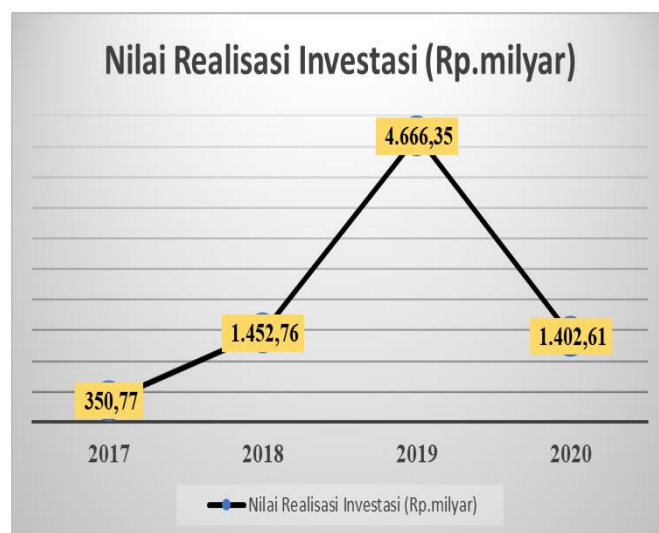
Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perijinan tercapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Realisasi investasi di Kabupaten Blitar terus meningkat setiap tahun dengan kemudahan perijinan investasi yang hanya 1 jam selesai. Nilai IKM Pelayanan Perijinan DPMPTSP menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahun. Tahun 2017 nilai IKM sebesar 76,06 poin, dengan menindaklanjuti hasil



IKM maka dilakukan kebijakan perbaikan tindak lanjut, sehingga tahun 2018 naik menjadi 79,35 poin dan akhir tahun 2019 meningkat lagi menjadi 81,5 poin. Program pelayanan investasi di era pandemi covid-19 tahun 2020 justru mendorong semangat inovasi bagi dinas ini. Pada tahun ini setidaknya ada 2 inovasi yang dilakukan yaitu “Ini Baru Joss Banget Mas” dan “Fast DS”. Program “Ini Baru Joss Banget Mas” meningkatkan akses pelaku usaha dapat lebih mudah untuk memohon/mandaftarkan izin usaha dan investasi Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan izin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Sedangkan, *Digital Signature* adalah aplikasi *I-Mobile* (sekarang *Imobil v.2*), inovasi aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik berbasis website. Aplikasi ini mendorong proses perizinan lebih efektif dan efisien, sehingga nilai kepuasan pelayanan diharapkan meningkat dengan nilai 84,22 poin (kategori Baik).

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 8 investor/penanam modal nasional masih tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar. Rp.1.402.605.782.271,-. Realisasi investasi tahun 2020, karena dampak pandemi covid-19, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 akan tetapi mendekati nilai realisasi investasi tahun 2018. Beberapa investor tersebut antara lain PT. Gideatama Perkasa dengan nilai investasi 500 milyar, PT. Kebon Agung dengan nilai investasi Rp.53,8 milyar dan PT. Nusantara Medika Utama dengan nilai investasi Rp. 44,7 milyar. Animo investasi yang tinggi tersebut, selain karena adanya pertimbangan pasar, juga karena adanya kemudahan berbagai layanan perizinan dan non perizinan yang ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai inovasi sistem pelayanan yang terus dilakukan oleh dinas penanaman modal.

Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 1,4 triliun sedangkan pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai Rp. 4,6 triliun dengan realisasi investasi kategori PMA sebesar Rp. 1,4 triliun dan realisasi investasi kategori PMDN sebesar Rp. 3,1 triliun. Untuk kenaikan realisasi investasi PMA pada tahun



2019 mencapai Rp. 1,2 triliun sementara kenaikan realisasi investasi PMDN pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,9 triliun. Angka realisasi pertumbuhan investasi sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir yaitu 267,68% pertahun. Sedangkan, tahun 2020, nilai realisasi investasi mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, sehingga beberapa investor menahan diri untuk investasi. Nilai investasi tahun ini Rp.1.402.605.782.271,- dengan jumlah investor sebanyak 8 usaha. Namun, nilai realisasi investasi ini sama dengan tahun 2018 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

Berbagai kegiatan promosi investasi daerah dilakukan 11 kali antara lain pameran di Kementerian Luar Negeri, pameran APKASI, pameran di Bandung, pameran EJI di Surabaya, pameran TEI di Jakarta, pameran akhir tahun di Kantor Bupati Blitar, *matchmaking* pelaku usaha di Malang, dan ikut serta dalam kegiatan promosi DPMPSTSP Provinsi di Bali, Manado dan Batam, serta disusun buku peta potensi daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi *leading sector* pencapaian sasaran strategis ini dengan realisasi program sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Serapan Anggaran	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Banyaknya inovasi dituntut pula adanya regulasi yang memberikan dasar legalitas atas penerapan aplikasi sistem tersebut bagi pelayanan perijinan. Regulasi yang ada masih banyak yang belum menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pelayanan ijin yang sudah mulai bergerak menuju Basis Digital.

2. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur manusia yang kompeten dalam penerapan teknologi informatika, khususnya untuk menuju ke pelayanan *online/digital* yang menuntut disiplin tinggi dalam pelayanan.
3. Daya dukung infrastruktur fisik dan teknologi yang lebih besar dan mendukung, agar proses pelayanan berjalan lancar dan tanpa terkendala jika diakses oleh investor secara *online* dan *real time*.
4. Tuntutan untuk mengembangkan berbagai sistem aplikasi *software* untuk mendukung kualitas pelayanan perizinan berbasis *digital/online*, harus terus dilakukan dan menjadi salah satu program kerja prioritas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

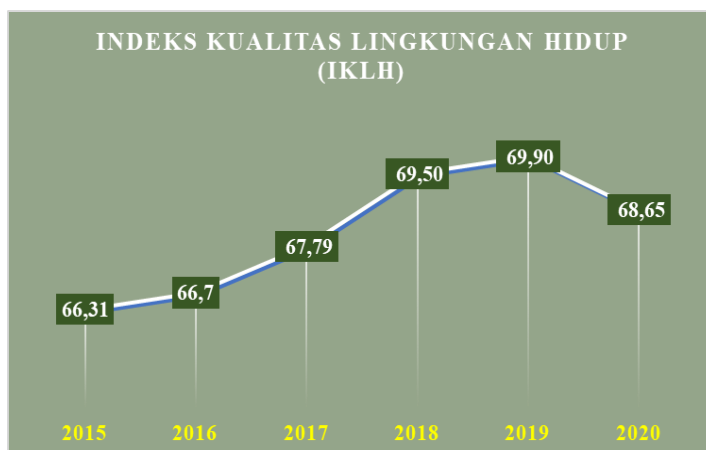
Strategi/solusi yang ditempuh adalah ini adalah:

1. Secara rutin dilakukan bimbingan teknis dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan DPMPTSP, terutama terkait dengan kompetensi melakukan pelayanan perijinan yang sudah menuju berbasis *online*.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya BKPM, BPS Kabupaten Blitar, Bagian Hukum, dan OPD terkait lainnya untuk bersama-sama menyusun regulasi dan tata kelola pelayanan perizinan yang akuntabel dan berbasis *online*.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung jaringan sistem aplikasi yang berbasis *online* secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur *fiber optic* yang memiliki kemampuan akses sistem yang cepat dan tinggi, sehingga tidak mengganggu proses perijinan.
4. Mengembangkan budaya kerja (habit) yang berdisiplin tinggi dan produktif serta menguasai penggunaan teknologi informasi sebagai dasar dalam memberikan proses pelayanan perizinan. Penerapan aplikasi sistem perizinan menuntut setiap petugas sampai pimpinan unit kerja untuk selalu merespon secara cepat karena setiap proses akan dapat dipantau jejak digitalnya oleh pengguna. Sehingga, proses perijinan jadi lebih akuntabel dan pasti, serta dapat dilakukan *tracking* secara online atas proses perkembangan penyelesaian dokumen perizinan. Ini membutuhkan *skill* dan perilaku yang profesional dari pemberi layanan.

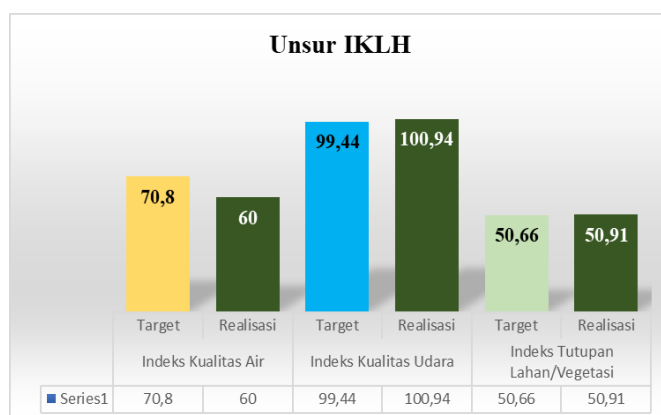
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,9	70	68,65	98,07%	-3,2	71
Persentase Ketaatan Tata Ruang (%)	80	84	100	119,05%	20	85
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				108,56%		

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan adalah 108,56% atau Kategori **Sangat Berhasil** yang menggunakan 2 (dua) indikator. Capaian kinerja IKLH didukung oleh 3 indikator kinerja lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH Kabupaten Blitar tahun 2020 selama 5 tahun terus mengalami kenaikan rata-rata 1,33 poin sampai dengan tahun 2019. Tahun 2015 nilai IKLH sebesar 66,31 poin dan angka ini terus naik secara moderat sehingga tahun 2019 bernilai 69,90 dan capaian kinerja tahun 2019 adalah 100% dari target. Akan tetapi, seiring dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi covid-19, maka dilakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan hampir 50%. Sehingga, banyak program/kegiatan lingkungan yang terpaksa harus dialokasikan untuk program pencegahan dan penanganan pandemi covid-19.



Dari 3 indikator tersebut IKLH, 2 indikator tercapai kinerjanya 100% yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam 2 tahun berturut-turut yaitu 2019 dan 2020, dan 1 indikator yaitu kualitas air tidak tercapai yaitu tahun 2019 tercapai 93,48% dan tahun 2020



tercapai 84,75%. Tahun 2019, Indeks Kualitas Udara terealisasi 99,44 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 98,73 poin atau tercapai 100,72% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisasi 50,66 poin yang melampaui target 50,21 poin atau tercapai 100,90%. Sedangkan, untuk Kualitas Air hanya tercapai 93,48% yaitu terealisasi 66 poin



dari 70,6 poin target yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja pada 3 indikator IKLH tahun 2020 semua mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Tahun 2020, Indeks Kualitas Udara terealisasi 100,94 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 99,44 poin atau tercapai 101,51%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisasi 50,91 poin yang melampaui target 50,66 poin atau tercapai 100,49%, dan untuk indikator Kualitas Air tercapai

84,75% yaitu terealisasi 60 poin dari 70,8 poin target yang ditetapkan. Maka, secara umum capaian kinerja seluruh unsur IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Berbagai inovasi program prioritas pencapaian kinerja gerakan lingkungan telah dilakukan antara lain 1) Gerakan Blitar Menanam yang tahun 2020 dilakukan pada 47 lokasi meliputi pantai, desa, RPH, dan tepi sungai dengan jumlah bibit ditanam sebanyak 21.825 bibit dan melibatkan sebanyak 3.234 orang; 2) Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) yang tahun 2020 dilakukan 4 lokasi yaitu RTH Kanigoro, Pasar Srengat, Jembatan Glondong dan Tepi Sungai Lodagung, yang mana gerakan ini sudah dilegalkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik, 3) Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) sebagai gerakan sadar fungsi sungai dan menjaga kebersihannya yang dilakukan pada 12 lokasi sungai (kali) dan sudah dilegalkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 dan didukung pembentukan pengurus Forum Kali Bersih, sosialisasi dan pembinaan, dengan kegiatan bersih-bersih sampah dan limbah di Sungai Lemon pada tanggal 02 Maret 2020, Sungai Brantas di Desa Minggirsari tanggal 10 Juli 2020, bersih-bersih Sungai Glondong pada tanggal 23 Desember 2020 bersama Perum Jasa Tirta, dan 4) gerakan PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yaitu evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan



penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3. Program ini juga didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang melalui program pengendalian dan kepatuhan tata ruang sesuai dengan RT/RW daerah.

Untuk capaian kinerja indikator Ketaatan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan berbagai kegiatan pengendalian baik melalui bentuk fasilitasi dan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang maupun penerbitan dokumen yang berisi pengendalian tata ruang, dengan capaian kinerja kegiatan 100%. Kebijakan yang mendukung IKLH adalah tentang pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini baru tercapai 1,3% dari ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 20%. Namun demikian, angka capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berkisar 1,1% dari seluruh wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan perhatian yang lebih besar pada pengendalian tata ruang ini dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan segera menyusun master plan pemenuhan Rung Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. Realisasi atas program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Lingkungan Hidup	7.703.084.057	7.443.716.537,89	96,63%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	464.230.000	386.044.084	83,20%
Serapan Anggaran	8.167.314.057	7.829.760.621,89	95,87%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak sampah rumah tangga (domestik) yang dibuang ke sungai.
2. Makin meningkatnya penggunaan produk plastik, sehingga meningkatkan volume sampah dan limbah (terutama plastik sekali pakai).
3. Masih fluktuatifnya kondisi parameter uji baku mutu air, antara lain parameter BOD, parameter Total Fosfat, dan parameter TSS, yang dapat sewaktu-waktu berubah cepat pada perubahan kondisi air, misalnya air hujan yang besar.

4. Sulitnya akses pengambilan sampel di daerah hulu. Daerah hulu seharusnya merupakan kawasan yang belum terdapat aktifitas manusia namun sulitnya akses jalan/jembatan dan keterbatasan kendaraan maka pengambilan sampel dilakukan di dekat pemukiman masyarakat, sehingga Pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan, sehingga tidak ada nilai pembandingan.
5. Keterbatasan alat ukur kualitas udara, sehingga nilai kualitas didapat dari data berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* dan hanya melakukan pemantauan udara ambien sesaat selama 1 jam (idealnya 24 jam).
6. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengajukan izin pemanfaatan ruang terutama untuk alih fungsi lahan dan bangunan melalui IMB.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

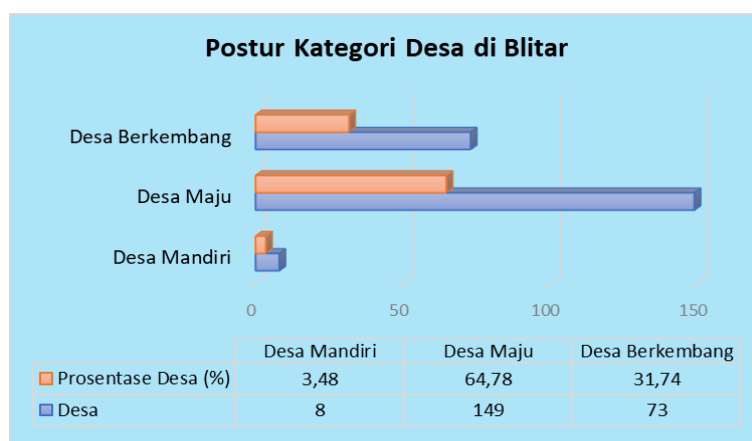
1. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat melalui gerakan dan aksi bersih sampah bersama pegiat, masyarakat, dan aparat desa, kecamatan, dan kabupaten serta stakeholder terkait.
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik yang mengatur tentang pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Blitar dan pengembangan usaha ekonomi kreatif pemanfaatan berbasis limbah plastik (*reuse*).
3. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggandeng pemerintah desa.
4. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada Dunia Usaha dalam pengelolaan limbah.
5. Melaksanakan Sosialisasi kepada Pengusaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah.
7. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon.
8. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman.
9. Melaksanakan pembinaan Ds/Kel. Berseri, Adiwiyata, Eco Pesantren dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.
10. Melaksanakan pembinaan kepada Ds/Kel. dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.

11. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dan Pertamanan dengan target 25% dan realisasi kinerjanya adalah 25% atau tercapai 100%.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa Strategis 12

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase desa berstatus pratama (%)	0,45	0	0	200%	-	0
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				200%		

Capaian kinerja sasaran strategis dari Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa adalah 200% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki 220 pemerintahan desa yang tersebar di 22 Kecamatan. Capaian kinerja



pemberdayaan terus meningkat setiap tahun, sehingga banyak desa yang mulai menuju desa maju dan mandiri. Desa berstatus pratama tahun 2020 sudah tidak ada lagi atau 0% dari seluruh desa. Dari 220 desa tersebut, sebagian besar merupakan desa maju dengan jumlah desa sebanyak 149 desa atau 64,78%, disusul oleh desa berkembang sebanyak 73 desa atau 31,74% dan sisanya adalah 8 desa (3,48%) sudah masuk kategori Desa sudah Mandiri. Pembangunan desa terus berkembang yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktif lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, PKK, Karang Taruna dan bahwa LSM, dan membangun menjadi Desa Siaga Aktif. Partisipasi ekonomi terus meningkat dari warganya yang ditunjukkan makin meningkatnya Swadaya Masyarakat di Program Pemberdayaan Masyarakat yang tahun 2019 mencapai Rp.3.990,6 Juta dan melampaui target Rp.3.430,2 juta dan pada tahun 2020 ini ditargetkan terus meningkat setiap tahun.

Pada bidang politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terus berusaha melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Blitar. Salah satu

inovasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem aplikasi online disebut Sistem Informasi Pilkades Kabupaten Blitar. Sistem ini memungkinkan setiap pemilih di Pilkades untuk melakukan proses pemilihan dari

FITUR APLIKASI SISTEM INFORMASI PILKADES KABUPATEN BLITAR



rumah. Sehingga, proses protokol kesehatan dari covid-19 dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, aplikasi ini sangat mampu mengurangi berbagai potensi kecurangan yang terjadi akibat dari adanya berbagai kecurangan yang dapat terjadi melalui pilkades manual. Penerapan sistem aplikasi ini diharapkan akan mendorong penguatan demokrasi melalui akuntabilitas proses pemilihan kepala desa.

Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dengan realisasi program-program sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.405.117.838	13.777.652.397	95,64%
Bagian Pemerintahan	1.567.090.000	1.567.090.000	100,00%
Serapan Anggaran	15.972.207.838	15.344.742.397	97,82%

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

Peningkatan kuantitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan melalui: (1) sosialisasi hasil pengukuran perkembangan desa; (2) rapat koordinasi lintas OPD guna sinkronisasi program/kegiatan yang memiliki target dan sasaran ke desa; (3) penetapan program prioritas masing-masing desa yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa dan APBDes (sesuai pedoman dari Kemendes RI).

3.2. Capaian Kinerja Makro Ekonomi Daerah

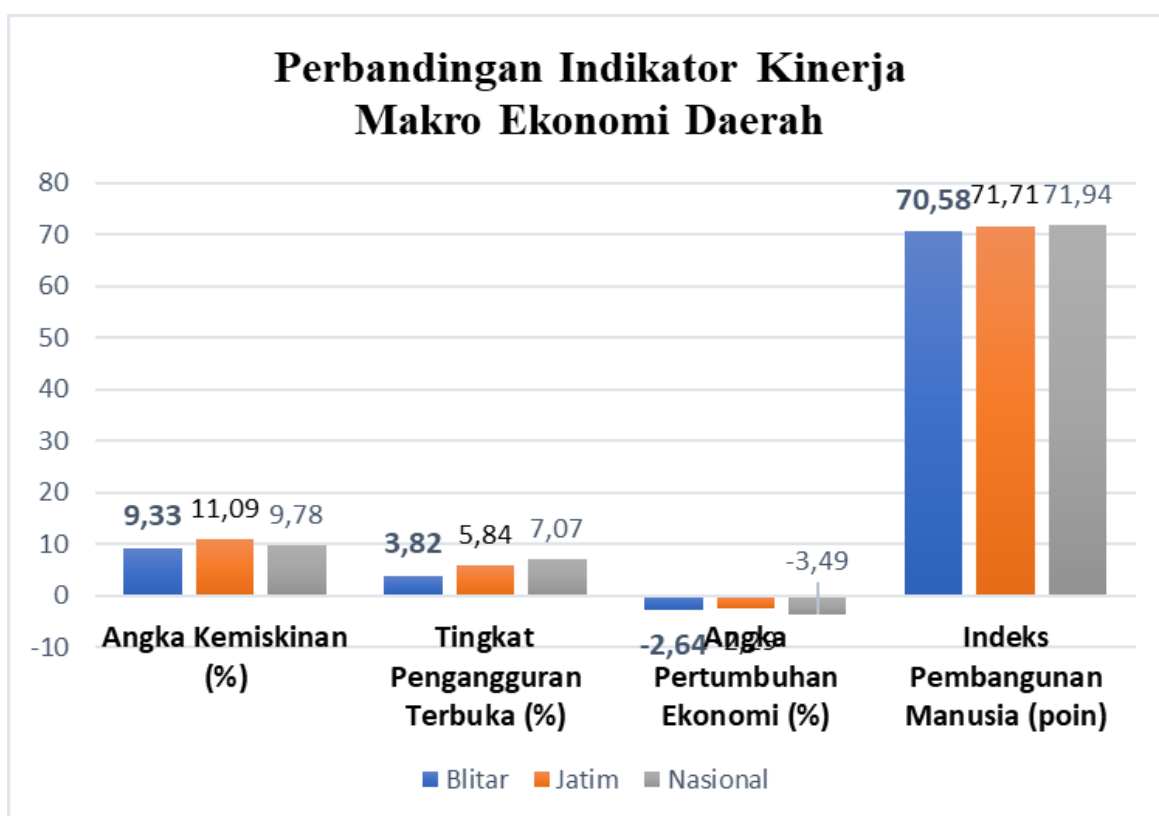
Capaian kinerja indikator makro ekonomi daerah tahun 2020 banyak yang minus atau turun akibat resesi ekonomi global yang dipicu dampak Pandemi Covid-19. Angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang diprediksi masih minus (-) 3,49 akan memberikan dampak *multiplier effect* massif pada berbagai indikator makro ekonomi lain, antara lain Pendapatan perkapita penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka dan akhirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan naik dari 9,22% tahun 2019 menjadi 9,78%. Demikian juga, untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 5,34% tahun 2019 melonjak menjadi 7,07% tahun 2020. Untuk pendapatan perkapita juga mengalami penurunan dari Rp.56 juta/tahun/penduduk menjadi Rp.54,5 juta/tahun/penduduk. Secara umum, indikator makro ekonomi nasional telah mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat regional Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang diprediksi masih minus (-) 2,29 memberikan dampak *multiplier effect* massif pada berbagai indikator makro ekonomi lain, antara lain Pendapatan perkapita penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka dan akhirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk angka kemiskinan naik dari 10,85% tahun 2019 menjadi 11,09%. Demikian juga, untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 3,92% tahun 2019 melonjak menjadi 5,84% tahun 2020. Dan untuk pendapatan perkapita juga mengalami penurunan dari Rp.55,5 juta/tahun/penduduk menjadi Rp.53,5 juta/tahun/penduduk. Secara umum, indikator makro ekonomi nasional telah memberikan dampak pada capaian kinerja indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagai dampak berantai Pandemi Covid-19.

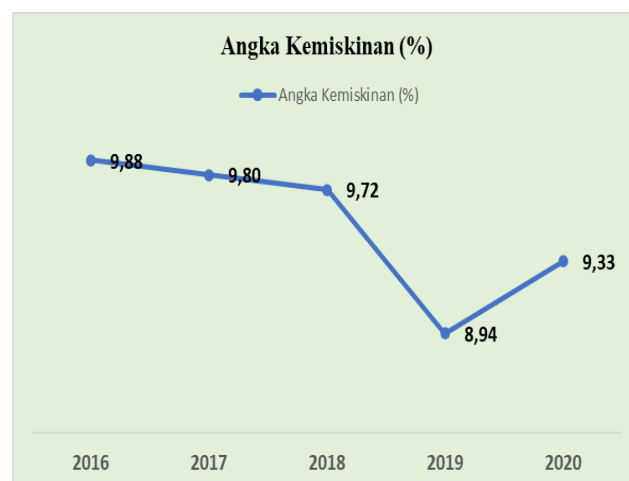
Capaian kinerja sasaran strategis memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian kinerja ekonomi makro daerah. Perbandingan capaian kinerja indikator makro ekonomi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana posisi kinerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dibandingkan dengan lingkup regional Jawa Timur dan Nasional. Capaian kinerja indikator makro daerah digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Perbandingan Capaian Beberapa IKU Terhadap
Capaian Kinerja Regional dan Nasional Tahun 2020**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi Kab. Blitar	Provinsi Jatim	Nasional	Sumber
1	Angka Kemiskinan (%)	9,33	11,09	10,19	BPS
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82	5,84	7,07	BPS
3	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	-2,29	-2,07	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,58	71,71	71,94	BPS
5	PDRB perkapita (Rp.000,-)	30.910	53.461	54.552	BPS



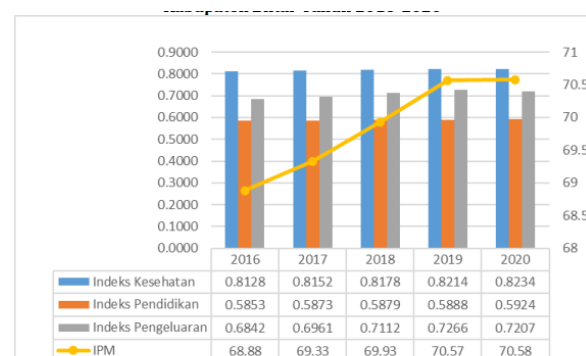
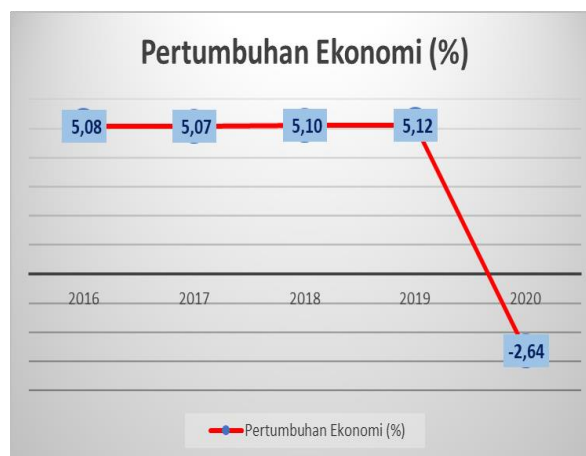
Kinerja makro ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik dibandingkan capaian kinerja Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Blitar tahun 2020 sebesar 9,33% dari penduduk yang angka ini di bawah Provinsi Jawa Timur (11,09%) dan Nasional (9,78%). Demikian



juga untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan capaian kinerja yang lebih baik yaitu 3,82% masih di bawah Provinsi Jawa Timur (5,84%) dan Nasional (7,07%). Untuk dan indeks pembangunan manusia (IPM), capaian Kabupaten Blitar tahun 2020 sedikit di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu 70,58 poin, di bawah 71,71 poin dan nasional 71,94 poin. Sedangkan, untuk angka pertumbuhan ekonomi posisi Kabupaten Blitar masih lebih baik, yaitu terkontraksi minus (-) 2,29%, sama dengan Jawa Timur -2,29 dan di atas (lebih baik) dari angka pertumbuhan nasional -3,49%. Dan untuk capaian kinerja angka PDRB Tahun 2020 berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional karena Kabupaten Blitar masih bertumpu pada sektor pertanian yang memiliki nilai tambah produksi rendah.

Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar selama 4 tahun 2016 – 2019 selalu mengalami penurunan yang signifikan, dengan rata-rata -3,22% per tahun. Tahun 2016 masih di angka 9,88% dan terus menurun menjadi 8,94% di tahun 2019. Akan tetapi tahun 2020, seiring dengan adanya Pandemi Covid-19, maka tingkat pencatatan perkapita penduduk menurun, banyaknya aktivitas ekonomi yang tutup dan kegiatan sosial yang berhenti, maka daya beli masyarakat ikut menurun dan angka kemiskinan merangkak naik menjadi 9,33% atau naik 4,36%. Namun demikian, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Sedangkan, untuk angka pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Blitar tahun 2020 berada pada angka -2,29%. Angka ini berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan di atas angka pertumbuhan nasional. Angka untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar terus meningkat sebesar 0,26% tahun 2016 – 2019. Tahun 2020, saat resesi ekonomi terjadi, dampak pandemi Covid-19, angka pertumbuhan ekonomi langsung merosot dan terkontraksi -2,29. Terkait dengan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Blitar terus mengalami kenaikan pada 3 indikator dan tahun 2020 tetap naik meski kecil yaitu menjadi 70,58 poin.



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020 (diolah)

3.2. Serapan Anggaran

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Hasil rekapitulasi capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	8,88	9,33	84,93%	8.459.881.338	8.127.681.272	95,86%	-10,92%
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	37,31	30,93					
		3. Indeks Daya Beli	0,70	0,72					
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	3,82					
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	91,51	99,62	108,86%	142.339.924.589,5	136.216.953.474	97,09%	2,53%
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	100%	16.293.587.053	15.343.877.451	94,17%	5,83%
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,64	0,59	92,19%	770.614.032.175	758.182.891.221	92,19%	0%
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8203	0,8234	100,38%	445.188.918.590	443.217.692.660	86,87%	13,51%
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	78,10	79,05	101,33%	1.066.967.120	971.322.870	91,03%	10,30%
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pem daerah	11. Nilai SAKIP	BB	B	97,19%	52.286.093.301	48.199.073.418	92,78%	4,41%
		12. Nilai LPPD	3,0540	3,0624					
		13. Opini BPK	WTP	WTP					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	100%	1.297.595.074.865	1.280.198.974.813	93,66%	6,34%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,03%	-7,25	45,53%	21.277.541.106	19.207.956.431	90,27%	-46,75%
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,13%	-5,26					
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3%	0,06%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	2.194.367	3.776.719					
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%	3,27%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	66,74	108,56%	8.167.314.057	7.829.760.621,89	95,87%	12,69%
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	84	100					
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	3,64	0	200%	15.972.207.838	15.344.742.397	97,82%	102,18%

Selama 2020 berbagai prestasi berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut antara lain:

1. Mempertahankan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya,
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 (5x berturut-turut)
3. Kabupaten Sehat “Swasti Saba Wistara”,
4. Top Leader on Digital Implementation 2020 Dalam TOP DIGITAL AWARDS versi Majalah IT Works,
5. STBM berkelanjutan-Kabupaten/Kota Stop BABS/ODF 100% oleh Menteri Kesehatan
6. Predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri
7. Nominasi II Kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi se-jawa dan bali pada TPID award Tahun 2020,
8. Kabupaten Peduli HAM (3x berturut-turut)
9. Terbaik II Penghasil PAD produk asal hewan di Jawa Timur
10. Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Propinsi Jawa Timur 2020 (JALASUTRA)
11. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Propinsi Jawa Timur 2020 (Joss Banget Mas)
12. Peringkat II Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memberikan Fasilitas HAKI terbanyak Tahun 2020 (total 120 pengajuan Fasilitas Merk)
13. Klaster terbaik Pendukung Ketahanan Pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi subsector peternakan/perikanan pada Bank Indonesia Award
14. Juara II dalam Penilaian Praktek Baik Kecamatan dalam Penanggulangan Covid-19 Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2020.





BAB **4** PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, dokumen RKPD 2020, Reviu IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2020. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri atas 6 Misi dan 12 sasaran dan 22 indikator kinerja. Pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2020, dihadapkan pada kondisi resesi ekonomi global akibat dampak Pandemi Covid-19 yang akhirnya berdampak pada capaian kinerja sasaran strategis daerah, khususnya pada indikator bidang ekonomi. Kontraksi pertumbuhan nasional tahun 2020, yaitu -3,49% dan Provinsi Jawa Timur -2,29%, telah berakibat pada Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang berkontraksi -2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5% selama 5 tahun terakhir. Berikutnya adalah pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan dari Rp31,39 juta pertahun di tahun 2019 menjadi 30,93 juta pertahun pada tahun 2020. Kondisi sektor ekonomi yang menjadi sasaran strategis ke-9 juga mengalami kontraksi, antara lain angka pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB yang berkontraksi -7,25% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% dan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang berkontraksi -5,26 yang juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,13%. Sedangkan, angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB yang masih tumbuh lambat sebesar 0,06% yang juga di bawah target daerah yaitu 3%. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini tidak mampu memenuhi target kinerja daerah dalam laporan akuntabilitas kinerja daerah. Sehingga, indikator kinerja ekonomi di dalam PK tahun 2020 ini tidak mampu dicapai dengan maksimal.

Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi dan Sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada dokumen RPJMD, maka capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 103,25% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan serapan anggaran sebesar 93,70% dan terjadi efisiensi kinerja sebesar 8,62%. Capaian kinerja ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 104,38% atau turun 1,13%. Demikian

juga, efisiensi kinerja juga mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 53,81% atau terjadi penurunan efisiensi 45,19%. Hal ini sebagai dampak resesi global pandemi Covid-19. Jika dilihat dari capaian kinerja setiap indikator kinerja, maka dapat dihasilkan sebanyak 13 atau 59,09% (lebih dari setengah) dapat dicapai dengan **Sangat Berhasil** (di atas 100%), sebanyak 5 indikator atau 22,73% dicapai dengan **Berhasil**, 1 (4,55%) indikator dicapai dengan **Cukup Berhasil** dan sisanya 3 indikator atau 13,64% dicapai dengan **Kurang Berhasil**. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih rendah dan memerlukan tindak lanjut kebijakan perbaikan di masa mendatang. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1.	Menurunnya angka kemiskinan	23. Angka Kemiskinan (%)	84,93%	95,86%	-10,92%
		24. Pendapatan per kapita (juta rupiah)			
		25. Indeks Daya Beli			
		26. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	27. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	108,86%	97,09%	2,53%
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	28. Persentase penanganan konflik (%)	100%	94,17%	5,83%
		29. Persentase penegakan PERDA (%)			
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	30. Indeks Pendidikan	92,19%	92,19%	0%
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan	31. Indeks Kesehatan	100,38%	86,87%	13,51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
	masyarakat				
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	32. Indeks Pemberdayaan Gender	101,33%	91,03%	10,30%
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	33. Nilai SAKIP	97,19%	92,78%	4,41%
		34. Peringkat Penilaian LPPD Se-Jawa Timur			
		35. Opini BPK			
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	36. Peringkat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100%	93,66%	6,34%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	37. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	45,53%	90,27%	-46,75%
		38. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)			
		39. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)			
		40. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)			
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	41. Predikat IKM Layanan	100%	96,73%	3,27%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
		Perijinan			
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 43. Persentase Ketaatan Tata Ruang	108,56%	95,87%	12,69%
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	44. Persentase desa berstatus pratama (%)	200%	97,82%	102,18%
Efisiensi (Inefisiensi)			103,25%	93,70%	8,62%

Penyebab utama rendahnya capaian kinerja sasaran strategis adalah karena krisis ekonomi global akibat Pandemi Covid-19. Berbagai upaya kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dapat menahan makin terpuruknya kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari resesi ekonomi massif ini. Kebijakan pertama yang dilakukan adalah *refocusing* anggaran di seluruh perangkat daerah dengan prioritas program untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, dukungan kegiatan ekonomi dengan protokol kesehatan ketat, stabilitas sosial dan politik masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Kebijakan resmi penanggulangan dan penanganan dampak Pandemi Covid-19 adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 sebagai pedoman tatan baru (*new normal*) dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang seimbang dalam pengendalian dan penanganan Covid-19 dan sekaligus menjadikan menegakkan protokol kesehatan ketat.

Beberapa perangkat daerah yang mengampu ekonomi secara agresif melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat antara lain Badan Pendapatan Daerah memberikan stimulasi insentif pajak berupa pembebasan pajak 100% bagi wajib pajak usaha pariwisata. Dinas koperasi dan usaha mikro dan perindustrian dan perdagangan memberikan bantuan fasilitasi berupa kemudahan akses pemasaran produk lokal dan gerakan aksi bela beli produk Kabupaten Blitar untuk mendorong sektor usaha mikro dan kecil terus tumbuh. Dinas Pertanian melakukan

penguatan kapasitas dan intensifikasi produksi pertanian, khususnya untuk tanaman biofarmaka, karena terbukti bisa bertahan dan untuk tanaman biofarmaka justru mengalami kenaikan meskipun rendah untuk tuntutan kesehatan. Kebijakan aksi tersebut menunjukkan telah mampu menahan kontraksi ekonomi Kabupaten Blitar yang masih dapat bertahan di minus (-) 2,29%, yang mana angka ini lebih baik dibanding nasional (-) 3,49%.

4.2. Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Strategi pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan ketat harus segera dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, dengan melakukan *refocusing* anggaran yang benar-benar produktif dan memberikan dampak langsung pada pencapaian kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagai sasaran strategis.
2. Menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan.
3. Melakukan peningkatan sinkronisasi indikator dan target kinerja antara RPJMD dan Renstra OPD pendukung serta kualitas indikator kinerja dengan memperhatikan unsur-unsur SMART sehingga bisa menghasilkan pelaporan yang lebih akuntabel.
4. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil
5. Membangun sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar dan semoga Pandemi Covid-19 segera berlalu.